



NUSANTARA FUND



LAPORAN
TAHUNAN 2024
Annual Report



LANGKAH AWAL PERUBAHAN

THE FIRST STEP TO CHANGE

LAPORAN TAHUNAN NUSANTARA FUND 2024: LANGKAH AWAL PERUBAHAN

Penanggung Jawab:

Ode Rakhman

Tim Penulis:

- Tanti Budi Suryani
- Indri Novia Kusworo
- Rahmat Lahangi
- Achmad F. H. Fajar

Penata Letak:

Doddy Suhartono

Nusantara Fund

Jl. O Kavling No. 12, RT. 9/ RW. 14, Kb. Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12830

info@nusantarafund.org

www.nusantarafund.org

NUSANTARA FUND ANNUAL REPORT 2024: THE FIRST STEP OF CHANGE

Editor:

Ode Rakhman

Drafter Team:

- Tanti Budi Suryani
- Indri Novia Kusworo
- Rahmat Lahangi
- Achmad F. H. Fajar

Layout by:

Doddy Suhartono

Nusantara Fund

Jl. O Kavling No. 12, RT. 9/ RW. 14, Kb. Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12830

info@nusantarafund.org

www.nusantarafund.org



“

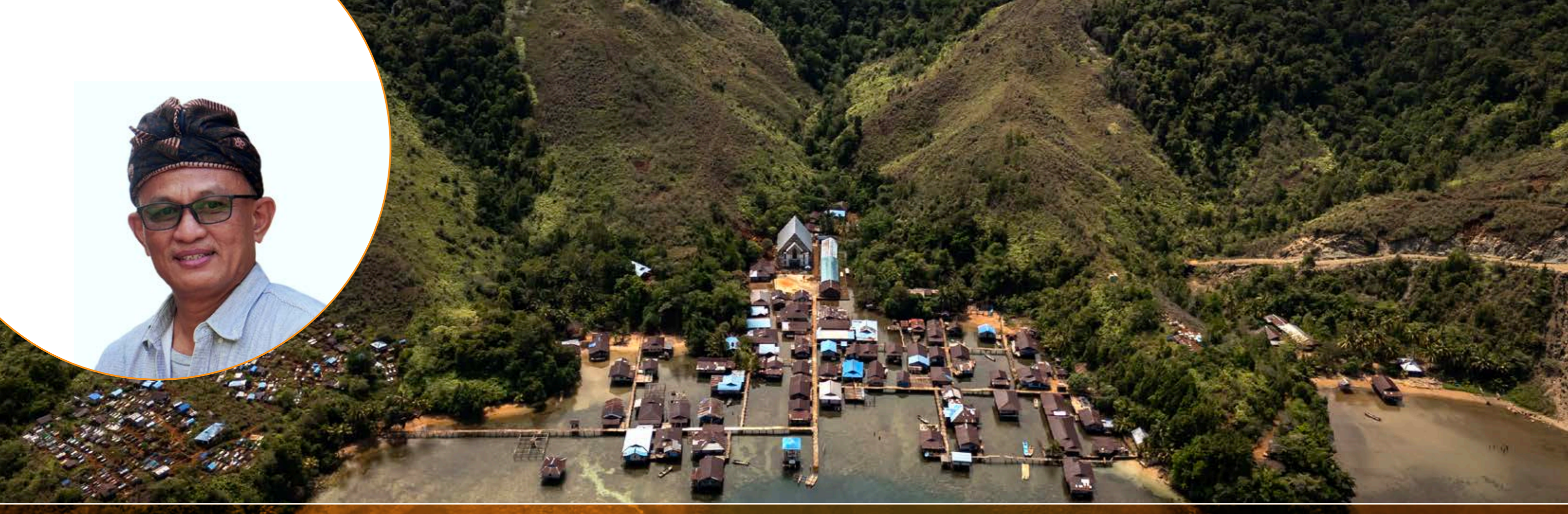
Manusia modern tidak merasakan dirinya sebagai bagian dari alam, tetapi sebagai kekuatan luar yang ditakdirkan untuk mendominasi dan menaklukkannya. Ia bahkan berbicara tentang pertempuran dengan alam, lupa bahwa, jika ia memenangkan pertempuran, ia akan mendapati dirinya berada di pihak yang kalah.

- Ernst F. Schumacher, dalam "Small is Beautiful" -

“

Modern man does not experience himself as a part of nature but as an outside force destined to dominate and conquer it. He even talks of a battle with nature, forgetting that, if he won the battle, he would find himself on the losing side.

- Ernst F. Schumacher, dalam "Small is Beautiful" -



Selayang Pandang

Setahun sudah Nusantara Fund beroperasi untuk menampung upaya-upaya yang dikerjakan langsung oleh masyarakat tingkat tapak. Dalam siklus perkembangan, satu tahun merupakan masa penetapan langkah awal dan fondasi penting bagi langkah selanjutnya.

Dari segi proses, Nusantara Fund berhasil mewujudkan inisiatif yang dibangun tiga organisasi pendiri (AMAN, KPA, dan WALHI) sebagai komitmen untuk mendanai langsung Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal. Keberhasilan di sini dalam konteks implementasi inisiatif dari Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal. Namun, untuk ukuran yang mendeskripsikan dampak perubahan tentu hal itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Perlu pengukuran terperinci dan pemantauan berkala untuk mengetahuinya.

Selain itu, ada perihal lain yang tidak kalah penting dari dampak perubahan, yaitu solid atau tidaknya komunitas basis yang telah didanai dengan komunitas basis yang lain. Namun, jawabannya juga tidak bisa disediakan oleh Nusantara Fund, melainkan tiga organisasi inisiator yang mampu melakukannya, karena bagaimanapun Nusantara Fund tidak bisa lepas dari perannya sebagai *supporting system* untuk mendukung gerakan yang diinisiasi oleh tiga organisasi

Overview

It has been a year since the Nusantara Fund has been in operation to accommodate efforts undertaken directly by communities at the grassroots level. In the development cycle, the first year was dedicated for setting the initial steps and important foundations for the next.

In terms of process, Nusantara Fund has succeeded in realizing the initiative built by the three initiating organizations (AMAN, KPA, and WALHI) as a commitment to directly fund Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities. Success here is in the context of implementing the initiatives from Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities. However, it will take years to measure the impacts for change. Detailed measurements and regular monitoring are needed to do so.

In addition, there is another issue that is no less important than the impact of change, namely whether the funded community has a solid connection with other surrounding communities. The Nusantara Fund cannot answer this question, but the three initiating organizations are able to do so, because after all Nusantara Fund cannot be separated from its role as a supporting system to the movement initiated by the three organizations. As a form of accountability, both the Nusantara Fund and the three initiating organizations will conduct monitoring

tersebut. Mungkin, sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik Nusantara Fund dan tiga organisasi inisiator melakukan pemantauan dari segiyangberbeda. Ketiga organisasi akan melakukan pemantauan dari segi gerakan. Sementara itu Nusantara Fund memantau tingkat partisipasi Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal dalam implementasi program, transparansi penggunaan dana, dan dampak program terhadap perjuangan yang mereka lakukan. Meski hasil kedua pemantauan itu berbeda, tetapi tujuannya sama-sama untuk menguatkan gerakan basis yang telah dibangun oleh Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal. Saya pikir, pemantauan seperti itu perlu dilakukan karena sejak awal telah disepakati bahwa landasan Nusantara Fund mengimplementasikan programnya bersumber pada *trust based* dan *right based*.

Selanjutnya, bicara tentang tantangan, pertama dari segi sebaran pendanaan belum menjangkau wilayah Indonesia secara merata. Sampai hari ini Nusantara Fund masih banyak melakukan pendanaan di wilayah Indonesia Barat dan masih sedikit menyentuh wilayah Indonesia Timur. Masalah ini sebenarnya masih bisa dicari jalan keluarnya dengan mengkomunikasikannya kepada ketiga organisasi inisiator. Tantangan kedua, tentunya untuk menemukan jawaban soal apakah distribusi pendanaan sudah sesuai kebutuhan Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal terkait perjuangan hak dan peningkatan kualitas hidup. Kami tentunya akan terus membangun proses belajar dan sering-sering mengevaluasi implementasi program guna menemukan formula untuk mengukur keberhasilan distribusi pendanaan secara efektif dan optimal.

Tantangan terakhir ada kaitannya dengan pembahasan krisis iklim. Maksudnya ialah apakah benar distribusi pendanaan ini dapat berkontribusi untuk isu tersebut. Inilah sebenarnya peran Nusantara Fund dalam memformulasikan dan mempublikasikan cerita-cerita perubahan yang diprakarsai oleh Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal. Proses publikasi cerita perubahan merupakan tahapan penting guna menjawab kesangsian publik terhadap peran Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal tentang perlindungan dan pelestarian alam. Bahwa Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal yang masih konsisten menjalankan praktik-praktik sosial sesuai dengan prinsip-prinsip tradisional mereka, kearifan lokal mereka, sejalan dengan upaya pelestarian yang menjadi tantangan global hari ini. Ironisnya, ketika Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal melakukan tugas untuk merawat bumi, posisi mereka juga terancam oleh kebijakan-kebijakan negara.

Dengan berjalannya program selama setahun ini, Nusantara Fund memiliki beberapa harapan di masa mendatang. Pertama, tentu kami berharap pendanaan langsung seperti ini tetap terus berjalan. Karena kalau semakin mengendur, ancamannya tentu akan mengecilkan perjuangan-perjuangan Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal yang sudah terbangun. Harapan kedua, semakin banyak yang menjalankan praktik pendanaan langsung. Nusantara Fund telah memiliki jejaring pendanaan, tidak hanya di Indonesia, tetapi di level Asia, juga di global. Kaitannya jejaring itu dengan praktik

from different perspectives. The three organizations will conduct monitoring from the standpoint of their respective movement. Meanwhile, Nusantara Fund monitors the level of participation of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities in program implementation, transparency in the use of funds, and the impact of the program on their struggles. While the results of the two separate monitoring are different, the aim is the same, to strengthen the movement that has been built by Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities. Such monitoring is necessary because from the beginning it has been agreed that Nusantara Fund implements its program on trust-based and rights-based principles.

There are a few challenges facing Nusantara Fund, the first being that the distribution of funding has yet to reach the Indonesian region evenly. To date, Nusantara Fund still does a lot of funding in Western Indonesia and little in Eastern Indonesia. This issue can be addressed by communicating it to the three initiating organizations. The second challenge, of course, is to find answers about whether the distribution of funding has met the needs of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities related to the struggle for rights and improving the quality of life. We will certainly continue the learning process and frequently evaluate program implementation to find a formula for measuring the success of funding distribution effectively and optimally.

The third challenge is related to the climate crisis discussion, as whether the funding distribution can contribute to the issue.

This is exactly where Nusantara Fund can play its role in sharing and publishing stories of change initiated by Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities. The process of publishing stories of change is an important stage to answer public doubts about the role of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities in nature protection and conservation. That Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities who still consistently carry out social practices in accordance with their traditional principles, their local wisdom, are in line with conservation efforts to address the current global challenges. Ironically, while Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities are doing their duty to care for the earth, their position is also threatened by the state's policies.

With this year-long program underway, Nusantara Fund has several hopes for the future. First, we hope that the direct funding will be sustainable in the long run, because if it slows down, the threat will certainly diminish the prolonged struggles of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities. Second, we hope more people to implement the practice of direct funding. Nusantara Fund already has a funding network, not only in Indonesia, but at the Asian level, as well as globally. The network will be a force that

pendanaan langsung ialah itu akan menjadi satu kekuatan yang dapat meningkatkan posisi tawar Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal. Mereka memang garda terdepan untuk krisis iklim. Namun, bila kenyataannya mereka tidak mendapatkan perhatian, semakin terancam dengan kebijakan negara, semakin dibiarkan sendirian menghadapi ancaman-ancaman, saya rasa itu tidak adil. Lalu, harapan terakhir, program pendanaan langsung itu diharapkan mampu berkontribusi terhadap konteks perubahan atau lebih tepatnya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal di Indonesia. Kalau kemudian Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal yang menjadi konstituen ketiga organisasi pendiri maupun yang belum terafiliasi dapat dikonsolidasikan menjadi satu kekuatan utuh, satu jejaring utama, bukan tidak mungkin harapan soal mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mengancam ruang hidup mereka bisa dicapai.

Kami sadar betul bahwa harapan maupun rencana yang sedang kami rumuskan masih jauh dari jangkauan. Usia muda Nusantara Fund ini masih dituntut untuk melampaui batu sandungan yang ada di depannya. Kami harus menarik napas dalam-dalam, menyiapkan amunisi terbaik, dan membuat ancang-ancang yang kokoh demi menciptakan satu langkah kemajuan.

Ode Rakhman

Direktur Nusantara Fund

can increase the bargaining position of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities. While they are indeed at the forefront of the climate crisis, they do not get enough attention, are increasingly threatened by state's policies, are often left alone to face threats, and these are unproportionate. Lastly, the direct funding program is expected to be able to contribute to the context of change or more precisely to influence policies related to Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities in Indonesia. If the Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities—who are the constituents of the three initiating organizations, plus the unaffiliated ones—are well consolidated into one single force and main network, then influencing the living space-threatening policies can be achieved.

We understand the hopes and plans we are devising are still far from reach. Nusantara Fund is young and must overcome the challenges laid ahead of it. We have to take a deep breath, prepare the best ammunition, and make a solid stand in order to create one step of progress.

Ode Rakhman

Director of Nusantara Fund

DAFTAR ISI

Selayang Pandang	iv
Bagian I: Mengapa Pendanaan Langsung?	1
• Sejarah dan Visi Nusantara Fund	5
• Misi dan Nilai-Nilai Dasar	6
• Peran Pendanaan Langsung Nusantara Fund Bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal	7
Bagian II: Capaian Nusantara Fund	9
• Alur Proses Pendanaan Langsung	11
• Target 1	14
• Target 2	15
• Target 3	17
• Target 4	18
• Target 5	20
Bagian III: Kisah Sukses	22
• Pasca Redistribusi Lahan, Pergerakan Petani Banten Bangun Sekolah Rakyat	22
• Rempang Tanah Tumpah Darah	24
• Memperkuat Soliditas Gerakan Masyarakat Adat Orang Rimba untuk Mendapatkan Hak Ruang Hidupnya	26
• Penguatan Gerakan Masyarakat Adat Pattiro Toa Sinjai Untuk Mendapatkan Pengakuan Wilayah Adatnya	28
Bagian IV: Dukungan Pendanaan	31
• Laporan Keuangan	32
Bagian V: Epilog	34

LIST OF CONTENTS

Overview	iv
Section I: Why Direct Funding?	1
• History and Vision of Nusantara Fund	5
• Mission and Core Values	6
• The Role of Nusantara Fund Direct Funding for Indigenous Peoples and Local Communities	7
Section II: Nusantara Fund Milestones	9
• Direct Funding Flow	11
• Target 1	14
• Target 2	15
• Target 3	17
• Target 4	18
• Target 5	20
Section III: Success Stories	22
• Post-Land Redistribution, Banten Peasants' Movement Builds People's School	22
• Rempang The Homeland	24
• Strengthening the Solidity of Orang Rimba's Indigenous Movement to Reclaim their Rights to Living Space	26
• Strengthening the Pattiro Toa Sinjai's Indigenous Movement to Obtain Recognition of its Indigenous Territory	28
Section IV: Funding Support	31
• Financial Report	32
Section V: Epilogue	34



BAGIAN I

Mengapa Pendanaan Langsung?

Kini, dunia mulai memandang dengan serius dampak dari krisis iklim. Kondisi itu muncul sebagai akibat penumpukan gas karbon dari aktivitas industri yang digalakkan mulai pertengahan tahun 1800an. Pertemuan demi pertemuan global diselenggarakan, hingga pada akhirnya muncul keputusan pada pendanaan langsung untuk mengatasi permasalahan krisis iklim itu.

Apabila kita tarik ke belakang, mekanisme pendanaan langsung baru dirancang tahun 2010 meski pada pertemuan-pertemuan sebelumnya di era 90an topik perubahan iklim sudah diangkat. Pada tahun 2015, dalam pertemuan yang membahas perubahan iklim di Paris ditetapkan bahwa pelaksana pendanaan itu harus mematuhi Perjanjian Paris. Namun, yang patut disayangkan ialah pembagian dana untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal hanya 7% atau sekitar 321 juta dollar Amerika yang disalurkan pada 2022. Jumlah itu terlalu kecil untuk inisiatif skala global, terutama bila dihitung dari pendanaan iklim secara umum yang artinya jumlah itu hanya 1% dari 16% dana yang disalurkan langsung ke Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

SECTION I

Why Direct Funding?

The world is now taking the impacts of the climate crisis seriously. This condition arose due to the accumulation of carbon gases from industrial activities promoted since the mid-1800s. Meeting after meeting was held at the global level, until finally a decision was made on direct funding to address the climate crisis.

If we look back, the direct funding mechanism was only designed in 2010 even though the topic of climate change had been raised at previous meetings in the 90s. In 2015, a meeting on climate change in Paris decided that the implementers of the funding must comply with the Paris Agreement. Unfortunately, the share of funding for Indigenous Peoples and Local Communities disbursed by 2022 was only 7% or around USD 321 million. This amount is far too small for a global-scale initiative, especially when compared to the overall climate finance, which means only 1% of the 16% of funds go directly to Indigenous Peoples and Local Communities.

Kecilnya bagian yang diberikan kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal tidak sebanding dengan bahaya yang mereka hadapi. Meski tanpa beban tugas melestarikan alam, yang sudah menjadi keseharian bahkan nafas hidup mereka, kehidupan kelompok Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal terus terancam oleh kebijakan-kebijakan yang tidak adil baik ketika periode kolonial hingga pemerintah nasional saat ini. Lalu, kini, ketika dunia yang ditempati bersama ini tengah menghitung mundur waktu kehancurannya, mereka hanya diberikan dana terlampau kecil guna menyelamatkannya.

Mari kita tilik lebih dalam. Tujuan besar pertemuan iklim ialah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, memperkuat kemampuan beradaptasi dari perubahan iklim, pemanfaatan teknologi yang mendukung energi terbarukan, sampai membatasi pemanasan global pada angka 1,5° celsius. Lanskap tujuan itu tercermin dalam tiga sektor: pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya (AFOLU); bangunan dan infrastruktur; serta pengelolaan limbah. Dengan memakai kaca mata program, demi efektivitas, efisiensi, dan hasil progresif yang cepat, pendanaan hanya perlu disalurkan ke wilayah-wilayah yang secara teknologi dan geografis memang sesuai dengan cetak biru penanggulangan krisis iklim yang telah disepakati. Ambil contoh di Indonesia. Dengan mempertimbangkan luasan hutan yang masih tersedia dan demi memberikan dampak besar pengurangan pemanasan global, kita hanya perlu menyalurkan dana ke Kalimantan dan Papua. Kalau kategori kekuatan alam lainnya diperluas, kita bisa memilih Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terkenal sebagai wilayah dengan potensi energi panas bumi yang belum dieksploitasi. Wilayah lain yang tidak masuk dalam kategori tersebut, seperti Jawa yang lingkungannya telah terdegradasi sangat parah, kita lupakan sejenak karena akan menjadi pekerjaan rumah yang terlalu berat untuk diatasi. Masih ada waktu sebelum detik kehancuran bumi ini berakhir.

Dengan perspektif demikian, justru kita telah melangkah mundur dari niat baik yang baru muncul tiga abad semenjak perubahan iklim ditemukan sebagai dampak Revolusi Industri pada abad XVIII. Karena dengan begitu, kita seperti mengalihkan permasalahan dari satu tempat ke tempat lain. Sembari menutup mata, kita meninggalkan kelompok rentan yang sama-sama memiliki peluang menjadi sekutu baik dalam upaya merawat bumi hanya karena kondisi geografis mereka dan alasan lain tidak sesuai dengan prasyarat penerima pendanaan. Itu baru satu soal.

Persoalan lain tentunya terkait pemosisian masyarakat tingkat tapak di dalam proyek iklim. Kriteria-kriteria yang dibangun dalam proyek pendanaan iklim itu tidak ubahnya menjadikan Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal sekadar objek pelengkap dari kepentingan global. Atau yang lebih buruk ialah bahwa mereka hanya “pencuci piring” bagi permasalahan yang sebenarnya bukan mereka pelakunya. Kalau *toh* ada kemenangan di sana, itu muncul bukan sebagai kebutuhan utama mereka, melainkan sebagai jawaban-jawaban yang sifatnya eksklusif dan menurut kepatutan kelompok tertentu atau dalam istilah program “*based by project*”. Percayalah, Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal akan lebih disibukkan pada persoalan administrasi dan pencapaian target

The small share given to Indigenous Peoples and Local Communities is disproportionate to the dangers they face. Even without the job of preserving nature, which has become their daily practices, the lives of Indigenous Peoples, People’s Organizations and Local Communities continue to be threatened by unjust policies from the colonial period to the current national government. Now, when the world is counting down to its destruction, these groups are given too little resources to save it.

Let’s take a deeper look. The big goal of the climate talks is to reduce greenhouse gas emissions, strengthen climate change adaptability, utilize technologies that support renewable energy, and limit global warming to 1.5o Celsius. The goal landscape is reflected in three sectors: agriculture, forestry and other land use (AFOLU); buildings and infrastructure; and waste management. From the program perspective, to achieve effectiveness, efficiency, and rapid progressive results, funding should only be channeled to areas that are technologically and geographically compatible with the agreed blueprint for tackling the climate crisis. In Indonesia, for example, considering the size of the standing forests and to have a major impact on reducing global warming, we would only need to channel funds to Kalimantan and Papua. If the category of other natural forces is expanded, we could choose East Nusa Tenggara (NTT), which is known as a region with unexploited geothermal energy potential. Other regions that do not fall into that category—such as Java, where the environment has been severely degraded—could be set aside as it would be too much workload to handle. The time is ticking to end this earth’s destruction.

With this perspective, we would step back from the good intentions that have only emerged three centuries since climate change was identified as a result of the Industrial Revolution in the 18th century. Doing so, we would only shift the problem from one place to another. While turning a blind eye, we are leaving behind vulnerable groups who are likely to be good allies in the effort to care for the earth just because their geographical conditions and other reasons do not fit the prerequisites of receiving fund. That’s just one issue.

Another issue is the positioning of local communities in climate projects. The criteria built into the climate finance project tend to make Indigenous Peoples, People’s Organizations, and Local Communities merely complementary objects of global interests. Even worse, they are just “dishwashers” for problems that they are contributing to. If there is a winning cause there, it does not emerge as their primary need, but as answers that are exclusive and according to the merits of certain groups or in program terms “based by project”. Believe me, Indigenous Peoples, People’s Organizations and Local Communities will be more preoccupied with administrative stuff and achieving

pengurangan emisi serta pemanasan global, sehingga melupakan upaya untuk membangun solidaritas kolektif mereka. Di sini, kita memang perlu mendudukan semua perkara itu sebagaimana adanya, sebelum berbicara muluk-muluk tentang penyelamatan dunia.

Sebenarnya, pendanaan serupa juga dilakukan oleh pemerintah. Jauh sebelum Nusantara Fund diluncurkan, pemerintah telah membentuk dua lembaga pengelola pendanaan iklim. Tahun 2009 Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dibentuk, disusul satu dekade kemudian atau tepatnya pada Oktober 2019 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) resmi disahkan. Kedua lembaga itu sama-sama mengelola dan menyalurkan dana iklim. Perihal itu sekilas tidak jadi soal, dengan mempertimbangkan semakin banyak lembaga yang melaksanakan pendanaan iklim maka kerja-kerja pelestarian dapat dilakukan lebih meluas. Namun, di beberapa proyek dana iklim di daerah bahkan setelah 4 tahun proyek digagas dan diimplementasikan, dana untuk masyarakat tidak kunjung dapat disalurkan akibat persoalan administrasi yang rumit. Juga yang patut diwaspadai ialah agenda lain pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi modal besar. Kita masih sering menjumpai, ketika pemerintah sedang semangat-semangatnya mengkampanyekan gerakan ketahanan iklim, di saat bersamaan kegiatan-kegiatan industri, privatisasi lahan, hilirisasi nikel dan pertambangan lainnya, reklamasi, serta kegiatan pengrusakan lainnya tetap berjalan. Rasanya susah, kalau tidak boleh mengatakannya mustahil, upaya pelestarian bisa berhasil tanpa mengerem laju kegiatan industri yang bersifat ekspansif, ekstraktif, dan eksploitatif. Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah cenderung programatik dan eksklusif, yang kegiatannya justru mengasingkan masyarakat tingkat tapak dari tanahnya, melalui perampasan maupun penghalauan keterlibatan masyarakat ke dalam proyek, dan inisiatif-inisiatif swakelola mereka. Benar, bahwa pemerintah mampu melakukan program berskala besar, seperti yang tampak pada proyek *food estate*, hilirisasi pertambangan, sampai dengan pembangunan pembangkit listrik bertenaga energi terbarukan. Namun, tanpa melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusan, kegiatan-kegiatan itu hanya akan terus menghasilkan kesengsaraan massal.

Kerancuan itu bukan tidak mungkin akan menciptakan tumbukan-tumbukan dengan upaya serupa yang dilaksanakan oleh lembaga lain, seperti organisasi non pemerintah (ornop). Begitu juga dengan upaya-upaya advokasi tingkat tapak yang selama ini digawangi oleh aktivis atau pemerhati lingkungan. Semua inisiatif baik yang telah dibangun sampai saat ini akan buyar bila pemerintah tidak segera menghentikan kebijakan-kebijakan yang justru meningkatkan laju pengrusakan alam. Meski sama-sama memakai istilah "green climate finance", sama-sama hijaunya, tetapi kepentingan tersembunyi yang bertentangan dengan upaya-upaya merawat bumi justru akan menjadi penghambat tersendiri.

Berangkat dari semua permasalahan itu, Nusantara Fund terlahir berdasarkan cita-cita tiga organisasi inisiator. Dalam babak perjalanan barunya, Nusantara Fund dituntut untuk membangun mekanisme pendanaan yang mampu melampaui bias-bias kepentingan dan peliknya administrasi birokrat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada

emission reduction and global warming targets, thus forgetting efforts to build their collective solidarity. We really need to put things as they are, before talking grandiosely about saving the world.

A similar kind of funding has been done by the government. Long before the Nusantara Fund was launched, the government had established two climate finance management institutions. In 2009 the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) was established, followed by a decade later or precisely in October 2019 the Environmental Fund Management Agency (BPDLH) was officially formed. Both institutions manage and distribute climate funds. At first glance, this is not an issue, considering that the more institutions implementing climate finance, the more widespread conservation work can be done. However, in some climate finance projects in the regions, even after four years of project initiation and implementation, funds for the community have not been disbursed due to complicated administrative issues. Another thing to watch out for is other government agendas related to the economic interests of big capital. We still often find, when the government is enthusiastically campaigning for the climate resilience movement, at the same time industrial activities, land privatization, nickel and other minerals downstream, reclamation, and other destructive activities are still running. It seems difficult, if not impossible, that conservation efforts can succeed without putting the brakes on expansive, extractive and exploitative industrial activities. The efforts made by the government tend to be programmatic and exclusive, whose activities displace site-level communities from their land, through appropriation or blocking community involvement in projects, and their self-management initiatives. It is true that the government can carry out large-scale programs, as seen in food estate projects, downstream mining, and the construction of renewable energy power plants. However, without involving communities in decision-making, these activities will only continue to cause greater misery.

This situation may create collisions with similar efforts carried out by other institutions, such as non-governmental organizations (NGOs). Likewise with site-level advocacy efforts that have been led by activists or environmentalists. All the good initiatives that have been built to date will be destroyed if the government does not immediately stop policies that increase the rate of destruction of nature. Although both use the term "green climate finance", both are green, but hidden interests that conflict with efforts to care for the earth will be an obstacle.

Considering all these problems, the Nusantara Fund was established based on the ideals of the three initiating organizations. In its new journey, Nusantara Fund is required to build a funding mechanism that can transcend the biases of interests, and the complicated bureaucratic administration described earlier. There are 5 major targets to be achieved in Nusantara Fund: territorial mapping, proposal for recognition of management areas, rehabilitation and reforestation,

5 target besar yang ingin dicapai dalam pendanaan Nusantara Fund: pemetaan wilayah, pengusulan pengakuan wilayah kelola, rehabilitasi dan penghijauan, pembangunan pusat pendidikan basis, serta kedaulatan ekonomi kolektif. Pada akhirnya target ini harus mampu berdampak pada 30 juta hektar dan 30 juta penduduk di Indonesia. Memang, misi utama Nusantara Fund berkaitan dengan ketahanan iklim sebagai pertanggungjawaban sosialnya, tetapi bukan berarti harus melepaskan beribu tangan yang dapat direngkuh dalam perjalanan baru kami. Nusantara Fund akan senantiasa mendukung upaya-upaya advokasi dan peningkatan kehidupan Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal yang telah diusahakan oleh ketiga organisasi inisiator selama ini. Tidak boleh ada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu yang mengungguli usaha gotong royong ini.

Nusantara Fund akan menyalurkan pendanaan langsung ke semua penjur, tidak peduli apakah wilayah penerima dana masih memiliki lahan hutan yang rimbun atau justru telah rusak parah. Penekanannya ada pada dukungan untuk mereka mendapatkan hak-hak atas tanah dan penghidupannya, dan kedaulatannya, juga penyelamatan lingkungan yang sedang mereka upayakan. Komunitas-komunitas yang terafiliasi maupun belum terafiliasi dengan ketiga organisasi inisiator di berbagai wilayah akan menjalin jejaring kekuatan masyarakat tingkat tapak. Meski untuk tahun pertama ini Nusantara Fund masih kesulitan dalam pemerataan pendanaan ke wilayah timur Indonesia, tetapi kami optimistis bahwa jaringan komunitas dari wilayah itu akan menguat pada tahun-tahun selanjutnya.

Pendanaan ini juga bertujuan meningkatkan posisi tawar Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal di hadapan kebijakan-kebijakan yang selama ini terus mengasingkan mereka dari penemuan solusi komunal. Penemuan kembali suara yang hilang juga ditekankan untuk kelompok-kelompok marginal, seperti kelompok perempuan, kelompok pemuda, dan penyandang disabilitas. Kesetaraan gender dan pengangkatan kelompok marginal lainnya merupakan bagian penting dalam upaya membangun keadilan sosial. Mereka semua akan disatukan ke dalam jaringan yang tengah diupayakan oleh Nusantara Fund dengan ketiga organisasi inisiator untuk membentuk satu kekuatan utuh yang tidak terpisahkan.

Tugas kami di Nusantara Fund ialah untuk mengumpulkan, menyarikan, dan mempublikasikan pembelajaran-pembelajaran yang bisa dipetik dari upaya-upaya Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal ke dalam apa yang kami sebut dengan cerita perubahan. Publikasi tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk komunitas dan organisasi rakyat yang menerima dana, melainkan juga untuk publik yang lebih luas. Sehingga dampak-dampak perubahan tidak hanya terjadi secara internal, dalam kelompok-kelompok penerima dana dan selama program berlangsung, tetapi memungkinkan adanya pertukaran informasi antarkomunitas bahkan setelah program usai.

Setelah runutan itu terlaksana, harapannya komunitas tingkat tapak akan semakin mampu mengadvokasi kepentingan dan memperjuangkan hak-hak hidup kelompok dari kebijakan-kebijakan yang selama ini memarginalkan mereka. Tentu, bahwa harapan

construction of a basic education center, and collective economic sovereignty. Ultimately, these targets should be able to have an impact on 30 million hectares of land and 30 million people in Indonesia. Indeed, Nusantara Fund's main mission is related to climate resilience as its social responsibility, but that does not mean we have to let go of the thousands of hands that can be held in our new journey. Nusantara Fund will always support the advocacy efforts and improvement of the lives of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities that the three initiating organizations have been working on. There must be no personal or group interests that override this collective action.

The Nusantara Fund will distribute funding directly to all, regardless of whether the recipient areas still have lush forest areas or have been severely degraded. The emphasis will be on supporting them to secure their land and livelihood rights, and sovereignty, as well as saving the environment they are working towards. Communities affiliated or unaffiliated with the three initiating organizations in various regions will establish networks of community power at the site level. Although for the first year, Nusantara Fund still has difficulties in distributing funding to eastern Indonesia, we are optimistic that the network of communities from the region will strengthen in the following years.

The funding also aims to improve the bargaining position of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities in the face of policies that have continued to exclude them from finding communal solutions. The rediscovery of lost voices is also emphasized for marginalized groups, such as women, youth, and people with disabilities. Gender equality and the upliftment of other marginalized groups are an important part of building social justice. They will all be brought together into the network that Nusantara Fund is working on with the three initiating organizations to form an inseparable whole force.

Our task at Nusantara Fund is to collect, extract and publish the lessons learned from the efforts of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities into what we call stories of change. The publication is not only intended for the communities and people's organizations that receive funding, but also for the wider public. Thus, that the impacts of change do not only occur internally, within grantee groups and during the program, but allow for the exchange of information between communities even after the program is over.

After the sequence is carried out, the hope is that the grassroots communities will be increasingly able to advocate for the interests and fight for their rights in the face of policies that have marginalized them. This hope is also related to their sovereignty where the grassroots

tersebut juga berkenaan dengan kedaulatan mereka atau komunitas tingkat tapak tidak menggantungkan diri kepada bantuan pihak luar lagi. Komunitas-komunitas itulah yang nantinya akan meneruskan upaya pembangunan jejaring tingkat tapak dengan menjangkau individu dan kelompok di wilayah-wilayah lain sehingga jaringan yang sudah ada akan semakin berkembang dan diperkuat.



SEJARAH DAN VISI NUSANTARA FUND

Nusantara fund dibentuk atas inisiatif bersama tiga organisasi besar yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang bertujuan mendukung berbagai upaya dan inisiatif dari Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal di tingkat tapak seperti Petani, Nelayan, Perempuan, dan Anak Muda dalam memperjuangkan hak-hak dan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pengelolaan sumber daya agraria dan lingkungan hidup yang dapat menunjang penghidupan secara mandiri, berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

Pendanaan langsung yang didukung oleh Nusantara Fund disalurkan melalui mekanisme administratif yang didesain sangat sederhana dan tidak mempersulit akses pendanaan bagi Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal namun tetap berpegang teguh pada prinsip dan standar akuntabilitas. Dalam skema pendanaan ini, penerima dana bukanlah objek program namun sebagai subjek kunci yang merencanakan dan mengimplementasikan upaya dan inisiatif program dalam menjawab permasalahan, urgensi, kebutuhan, dan situasi unik dari masing-masing komunitas masyarakat sehingga pendanaan ini bermanfaat secara langsung hingga tingkat tapak.

Adapun visi Nusantara Fund adalah membangun mekanisme pendanaan yang kuat untuk mendukung berbagai inisiatif Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal dalam memecahkan tantangan pengakuan hak tenurial dan mengelola tanah, air, wilayah, lingkungan hidup, dan sumber-sumber agraria

communities do not depend on external assistance anymore. These communities will continue the efforts to build grassroots-level networks by reaching out to individuals and groups in other areas so that the existing network will be further developed and strengthened.



HISTORY AND VISION OF NUSANTARA FUND

The Nusantara Fund was formed on the joint initiative of three major organizations consisting of the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN), the Consortium for Agrarian Reform (KPA), and Indonesian Forum for the Environment (WALHI), aiming to support various efforts and initiatives from Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities at the grassroots such as Farmers, Fisherfolks, Women, and Youth in fighting for their rights and improving their quality of life through the management of agrarian and environmental resources that can enable independent, socially just, and sustainable livelihoods.

Direct funding from Nusantara Fund is channeled through a very simple administrative mechanism which does not further complicate access to funding for Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities while still adhering to accountability principles and standards. In this funding mechanism, the recipient is not the object of the program but a key subject who plans and implements the program and initiatives in response to the problems, urgency, needs, and unique situations of each community, making this funding directly beneficial at the site level.

The vision of Nusantara Fund is to establish a strong funding mechanism to support various initiatives of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities in solving the challenges in the recognition of their tenure and management rights to land, water, territories, environment, and other agrarian resources.

lainnya. Serta meningkatkan kontribusi dalam pengurangan emisi terkait deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan stok karbon, dan mendorong ekonomi berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

MISI DAN NILAI-NILAI DASAR

Misi :

- Mempromosikan dan menerapkan dukungan pendanaan langsung yang sederhana namun kuat untuk mendukung inisiatif Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal.
- Mengembangkan kuantitas dan kualitas sumber daya individu/ kelompok Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal di Indonesia.
- Membangun dan memperkuat kekuatan kolektif ekonomi, sosial, dan politik Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal di Indonesia.
- Mendesak dan mengembalikan peran negara untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal dalam mengurus lingkungan hidup, sumber daya alam, dan reforma agraria.
- Menginisiasi kemandirian ekonomi melalui pengembangan dan pengelolaan beragam sumber daya untuk mencapai resiliensi pendanaan organisasi.

Nilai-Nilai dasar:

- Berbasis masyarakat berarti mendukung secara langsung inisiatif Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal sebagai upaya mereka untuk mencegah kerusakan, melindungi dan memperbaiki lingkungan, tanah, hutan, dan sumber daya mereka.
- Akuntabilitas dengan proses sederhana untuk mengakses dana dan peningkatan kapasitas, termasuk bantuan teknis, penguatan kelembagaan dan kemampuan pelaporan teknis, dengan tetap berpegang pada standar akuntabilitas nasional dan internasional.
- Kesetaraan yang saling menguatkan antara lembaga pengelola dan pengakses dana sehingga memandang pendanaan sebagai sarana untuk mencapai penguatan semua pihak terkait.
- Fleksibilitas artinya dana lebih mudah diakses dari segi proses, kecepatan, penggunaan, pemantauan, dan pelaporan. Keterikatan langsung antara Nusantara Fund dengan masyarakat penerima manfaat memungkinkan hal ini dilakukan.
- Inklusif dan transparan dalam hal penentuan prioritas sasaran, wilayah, dan keadaan darurat antara penerima dana dan pelaksana proyek.

At the same time, our vision is to increase contribution in reducing emissions related to deforestation and forest degradation, increase carbon stocks, and promote community-based economies to improve people's quality of life

MISSION AND BASIC PRINCIPLES

Mission:

- Promote and implement simple yet robust direct funding support for Indigenous Peoples', Peoples' Organizations' and Local Communities' initiatives.
- Develop the quantity and quality of resources of individuals/ groups of Indigenous Peoples, Peoples' Organizations, and Local Communities in Indonesia.
- Build and strengthen the collective economic, social, and political power of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities in Indonesia.
- Urge and restore the role of the state to recognize and protect Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities in managing the environment, natural and agrarian resources.
- Initiate economic independence through the development and management of diverse resources to achieve organizational funding resilience.

Basic Principles:

- Community-based means directly supporting the initiatives of Indigenous Peoples, People's Organizations and Local Communities as they seek to prevent damage, protect and restore their environment, lands, forests and resources.
- Accountability with simple processes for accessing funds and capacity building, including technical assistance, institutional strengthening and technical reporting capabilities, while adhering to national and international accountability standards.
- Equality between the institutions managing and accessing the funds so as to view funding as a means to achieve the strengthening of all parties concerned.
- Flexibility means the fund is more accessible in terms of process, speed, utilization, monitoring, and reporting. The direct link between Nusantara Fund and the beneficiary communities makes this possible.
- Inclusive and Transparent in terms of prioritization of targets, areas, and emergencies between recipients and project implementers.

- Penghormatan atas Hak Asasi Manusia artinya setiap kegiatan harus berorientasi pada perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan kebebasan dasar serta hak asasi Masyarakat Adat dan hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Deklarasi PBB, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah kelompok.

PERAN PENDANAAN LANGSUNG NUSANTARA FUND BAGI MASYARAKAT ADAT, ORGANISASI RAKYAT, DAN KOMUNITAS LOKAL

Nusantara Fund sebagai sistem pendukung bagi Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal di tingkat tapak memiliki peran penting untuk mewujudkan berbagai upaya dan inisiatif program yang akan dan/atau telah dilaksanakan komunitas masyarakat. Hingga tahun 2024, Nusantara Fund telah berhasil mendukung pendanaan langsung sebanyak 250 inisiatif yang didistribusikan dalam 3 siklus. Adapun skema internal sebanyak 217 inisiatif, solidaritas sebanyak 32 inisiatif, dan konsorsium sebanyak 1 inisiatif yang mewakili Komunitas Masyarakat Adat, petani, nelayan, orang muda, dan perempuan yang tersebar di 34 Provinsi.

Dukungan pendanaan langsung ini diarahkan untuk mendukung capaian lima target Nusantara Fund, yaitu (1) peningkatan pemetaan Wilayah Adat, Wilayah Kelola Rakyat, dan Lokasi Prioritas Reforma Agraria sebesar 20 juta hektar dari yang telah dipetakan saat ini; (2) peningkatan perlindungan serta pendaftaran tanah dan wilayah Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal seluas 7,8 juta hektar dari yang diakui saat ini; (3) rehabilitasi dan restorasi 3,5 juta hektar wilayah serta lahan Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal; (4) terwujudnya berbagai model produksi, distribusi, dan konsumsi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal; dan (5) pembentukan pusat-pusat "Pendidikan Rakyat" yang berfungsi untuk merevitalisasi, memulihkan, berinovasi, dan berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas, kualitas pengetahuan, dan keterampilan Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal dalam mempertahankan, melindungi, dan mengelola tanah, wilayah, serta sumber daya mereka.

Jika dilihat perbandingan inisiatif program terhadap lima target Nusantara Fund di setiap inisiatif program Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal yang didanai oleh Nusantara Fund dalam skema pendanaan langsung menunjukkan bahwa terdapat 163 atau 65% inisiatif dari total 250 inisiatif yang diusulkan oleh Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal itu berkontribusi langsung terhadap 2 sampai 4 target capaian Nusantara Fund. Rinciannya adalah sebanyak 50% atau 126 inisiatif mendukung 2 capaian target Nusantara Fund sekaligus di setiap proposalnya, 13% atau 32 inisiatif mendukung 3 capaian target Nusantara Fund, dan 2% atau 5 inisiatif program mendukung 4 target capaian Nusantara Fund. Sementara inisiatif program yang berkontribusi terhadap 1 capaian target Nusantara Fund sebanyak 35% dari total inisiatif program yang masuk di tahun 2024.

- Respect for Human Rights: every activity must be oriented towards the protection, promotion, and fulfillment of the basic freedoms and human rights of Indigenous Peoples and the human rights contained in the Human Rights Act and the UN Declaration, both as individuals and as a group.

THE ROLE OF NUSANTARA FUND DIRECT FUNDING FOR INDIGENOUS PEOPLES, PEOPLE'S ORGANIZATIONS, AND LOCAL COMMUNITIES

Nusantara Fund as a support system for Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities at the grassroots has an important role in realizing various efforts and program initiatives that will and/or have been implemented by the community. Until 2024, Nusantara Fund has successfully provided direct funding for 250 initiatives distributed in 3 cycles. There are 217 internal schemes, 32 solidarity initiatives, and 1 consortium initiative representing Indigenous Peoples, farmers, fisherfolk, youth, and women spread across 34 provinces.

This direct funding is oriented to support the achievement of five Nusantara Fund targets, namely (1) an increase in the mapping of indigenous territories, people's management areas, and Agrarian Reform Priority Locations by 20 million hectares from which currently mapped; (2) an increase in the protection and registration of land and territories of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities by 7.8 million hectares from which currently recognized; (3) rehabilitation and restoration of 3.5 million hectares of territories and lands of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities; (4) the realization of various models of production, distribution, and consumption that are equitable and sustainable in accordance with the principles of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities; and (5) the establishment of "People's Education" centers that serve to revitalize, restore, innovate, and collaborate to improve the capacity, quality of knowledge, and skills of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities in defending, protecting, and managing their lands, territories, and resources.

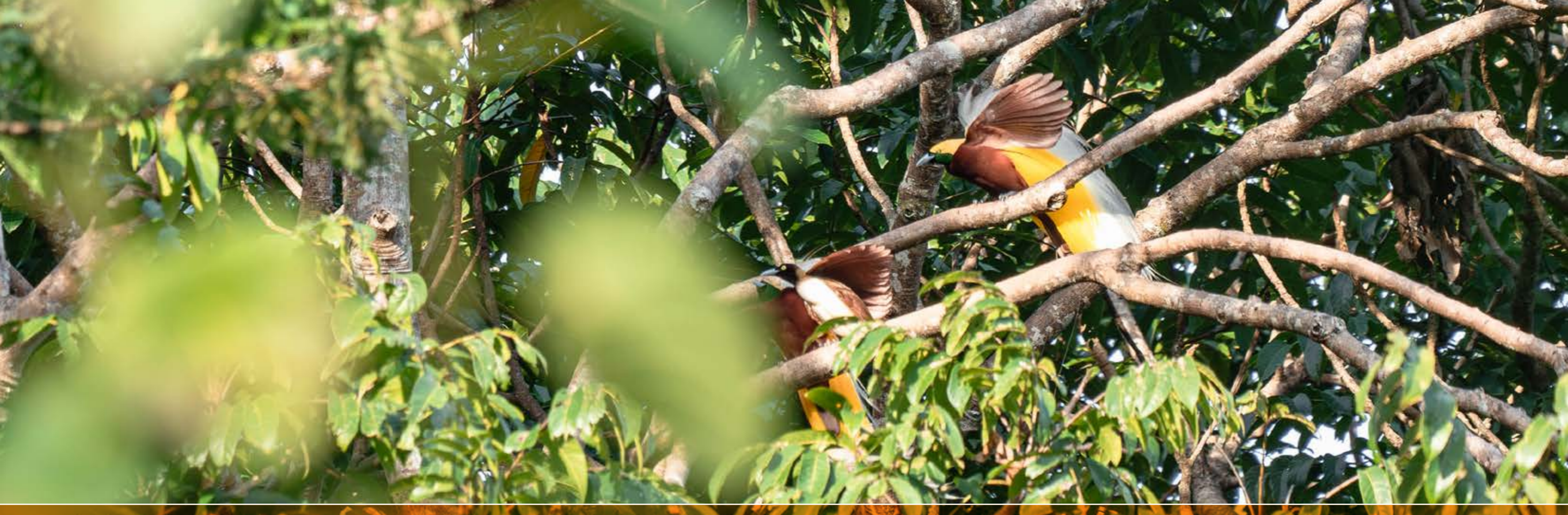
If we look at the comparison between program initiatives and the five Nusantara Fund targets in each movement Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities funded by the Nusantara Fund direct funding scheme, there are 163 or 65% of the total 250 initiatives proposed by Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities that directly contribute to 2 to 4 Nusantara Fund target achievements. In details, 50% or 126 initiatives support 2 Nusantara Fund targets at once in each proposal, 13% or 32 initiatives support 3 Nusantara Fund targets, and 2% or 5 program initiative support 4 Nusantara Fund targets. While program initiatives that contribute to 1 target are 35% of the total program initiatives in 2024.

Tingginya angka persentase jumlah inisiatif dari Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal yang mendukung capaian target Nusantara Fund lebih dari satu target di setiap proposal membuktikan bahwa peran Nusantara Fund sebagai pendukung utama cukup signifikan dalam mendukung berbagai upaya dan inisiatif dari Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal tingkat tapak seperti petani, nelayan, perempuan, orang muda dan lainnya dalam memperjuangkan hak-hak mereka, meningkatkan kualitas hidup dalam mengolah sumber daya penghidupan, mengakses sumber agraria, dan meningkatkan lingkungan hidup mereka secara mandiri, berkeadilan sosial, serta berkelanjutan.

Secara umum, dampak yang terjadi dari berbagai upaya inisiatif program yang diperoleh atas dukungan Nusantara Fund meliputi: (1) komunitas masyarakat memiliki strategi baru untuk mengamankan wilayahnya; (2) meningkatnya kualitas lahan dan sumber air yang dimanfaatkan komunitas masyarakat; (3) semakin menguatnya konsolidasi gerakan masyarakat untuk bersama-sama dalam memperjuangkan hak-hak hidup; (4) komunitas masyarakat menemukan alternatif baru dalam meningkatkan penghasilan yang dikelola secara kolektif; dan (5) meningkatnya literasi perempuan dan orang muda.

The high percentage of initiatives from Indigenous Peoples, Peoples' Organizations, and Local Communities contributing to the achievement of more than one target in each proposal proves that the role of Nusantara Fund as the main enabler is quite significant in supporting various efforts and initiatives from Indigenous Peoples, Peoples' Organizations, and Local Communities at the grassroots such as farmers, fisherfolk, women, youth and other groups in fighting for their rights, improving the quality of life, managing resources, accessing agrarian resources, and nurturing their living environment in an independent, socially just, and sustainable manner.

In general, the impacts from various program initiatives are generated with the support of the Nusantara Fund including but not limited to: (1) a new strategy that the community develop to secure its territory; (2) improvement in the quality of land and water sources utilized by the community; (3) stronger consolidation of the community movement to jointly fight for their rights; (4) the community find new alternatives in increasing income that are managed collectively; and (5) increased literacy of women and youth.



BAGIAN II

Capaian Nusantara Fund

Dalam sepuluh tahun Nusantara Fund akan memberikan dampak langsung kepada setidaknya 30 juta masyarakat atau 1/9 dari total penduduk Indonesia dan berdampak pada 30 juta hektar hutan dan lahan, atau 1/6 dari total luas daratan Indonesia melalui pencapaian lima target utama pemetaan, perlindungan dan pengakuan wilayah, rehabilitasi, ekonomi, dan pendidikan.

Selama tahun 2024 Nusantara Fund telah mendukung 250 inisiatif dalam tiga siklus. Siklus pertama, Nusantara Fund menerima 384 inisiatif dari komunitas yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia melalui skema terbuka (*open call*). Setelah melalui proses penyeleksian oleh komite dari AMAN, KPA, dan WALHI pada 31 Januari 2024, Nusantara Fund memilih 76 inisiatif dari 30 provinsi yang di dalamnya termasuk untuk solidaritas dengan alokasi 10% (komunitas lain yang belum terafiliasi dengan ketiga organisasi inisiatif). Jumlah pendanaan setiap komunitas beragam mulai dari Rp35.000.000,- (USD2.258) sampai Rp100.000.000,- (USD6.452), dan terdapat satu inisiatif konsorsium AMAN, KPA, dan WALHI yang memperjuangkan lima komunitas di Pulau Rempang, Riau, dengan dukungan Rp300.000.000,- (USD19.355). Total dana yang didistribusikan oleh Nusantara Fund di siklus pertama

SECTION II

Nusantara Fund Milestones

In ten years, Nusantara Fund is projected to directly impact at least 30 million people or 1/9 of Indonesia's total population and impact 30 million hectares of forest and land or 1/6 of Indonesia's total terrestrial area through the achievement of five main targets namely mapping, protection and recognition, rehabilitation, economy, and education.

During 2024 Nusantara Fund has supported 250 initiatives in three cycles. In the first cycle, Nusantara Fund received 384 initiatives from communities spread across 36 provinces in Indonesia through an open call for proposal. After a selection process by a committee from AMAN, KPA, and WALHI on January 31, 2024, Nusantara Fund selected 76 initiatives from 30 provinces which included a 10% allocation for solidarity (for other communities unaffiliated with the three initiating organizations). The amount of funding for each community varied from Rp35,000,000 (USD2,258) to Rp100,000,000 (USD6,452). Besides, there is one initiative by the consortium of AMAN, KPA and WALHI fighting five communities in Rempang Island, Riau, with support amounting to Rp300,000,000 (USD19,355). The total funds Nusantara Fund has

INISIATIF DAN HASIL PENDANAAN SIKLUS 1 – 3



Pencapaian 5 target Nusantara Fund akan berdampak langsung pada sedikitnya **30 juta Orang** atau setidaknya 11% dari total penduduk Indonesia dan berdampak pada **30 juta Hektar hutan dan lahan**, atau 1/6 dari total luas daratan Indonesia

34 Provinsi	>3 Juta Orang	68 Organisasi Tani Lokal	19 Kelompok Perempuan
250 Inisiatif	115 Masyarakat Adat	54 Komunitas Lokal	13 Kelompok Pemuda
10 Kelompok Nelayan	2 Kelompok Buruh	9 Komunitas di 7 Provinsi yang berhubungan dengan konflik transisi energi	

	SIKLUS 1			SIKLUS 2			SIKLUS 3		
	Internal	Solidaritas	Konsorsium	Internal	Solidaritas	Konsorsium	Internal	Solidaritas	Konsorsium
	21	2	-	23	3	-	26	5	-
	23	3	-	24	4	-	23	4	-
	24	2	1	24	3	-	29	6	-

HASIL

293,782 Ha 50 Kelompok 20 Provinsi

Target 1*

Peningkatan pemetaan Wilayah Adat, Wilayah Kelola Rakyat, dan Lokasi Prioritas Reforma Agraria sebesar 20 juta hektar dari yang saat ini telah dipetakan.

178,249 Ha 20 Dokumen 12 Provinsi

Target 2*

Peningkatan perlindungan dan pendaftaran tanah dan wilayah Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal seluas 7,8 juta hektar dari yang diakui saat ini.

32,257 Ha 50 Proposal 24 Provinsi

Target 3*

Rehabilitasi dan restorasi 3,5 juta hektar wilayah serta lahan Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal.

116 Kelompok 97 Proposal 27 Provinsi

Target 4

Terwujudnya berbagai model produksi, distribusi dan konsumsi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal.

82 Lokasi 11.053 Orang 26 Provinsi

Target 5

Pembentukan pusat-pusat "Pendidikan Rakyat" yang berfungsi untuk merevitalisasi, memulihkan, berinovasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas, kualitas pengetahuan dan keterampilan Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal dalam mempertahankan, melindungi dan mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya mereka.

*Contribute to Biodiversity

FUNDING INITIATIVES AND RESULTS CYCLES 1 – 3



In a decade, Nusantara Fund targets will directly impact at least **30 million people** or at least 11% of the total population of Indonesia and impact **30 million hectares of forest and territory**, or 1/6 of Indonesia's total land area

34 Province	>3 Million People	68 Local Farmer Organization	19 Women Groups
250 Initiatives	115 Indigenous Peoples	54 Local Communities	13 Youth Groups
10 Fisherfolks	2 Labor Group	9 Communities in 7 Provinces related to energy transition conflicts	

	CYCLE 1			CYCLE 2			CYCLE 3		
	Internal	Solidarity	Consortium	Internal	Solidarity	Consortium	Internal	Solidarity	Consortium
	21	2	-	23	3	-	26	5	-
	23	3	-	24	4	-	23	4	-
	24	2	1	24	3	-	29	6	-

RESULTS

293,782 Ha 51 Groups 20 Province

Target 1*

Increase mapping of Indigenous Territory, Community Managed Areas, and Priority Agrarian Reform Location by 20 million hectares from the currently mapped.

178,249 Ha 20 Documents 12 Province

Target 2*

Increasing protection and registration of lands and territory of Indigenous Peoples, People's Organization, and Local Communities and to 7,8 million hectares from the existing recognized.

32,257 Ha 50 Proposals 24 Province

Target 3*

Rehabilitation and restoration of 3.5 million hectares of territories and lands of Indigenous Peoples, People's Organizations and Local Communities.

116 Groups 97 Proposals 27 Province

Target 4

The realization of various models of production, distribution and consumption that are just and sustainable in accordance with principles of Indigenous Peoples, People's Organizations and Local Communities.

82 Locations 11.053 People 26 Province

Target 5

The establishment of "Peoples Education" centres that function to revitalize, restore, innovate and collaborate to increase the capacity, quality of knowledge and skills of Indigenous Peoples, People's Organizations and Local Communities in protecting and managing.

*Contribute to Biodiversity

adalah sebesar 6,4 milyar rupiah (USD427.778) yang didukung Packard Foundation, Thousand Currents, dan Ford Foundation.

Skema *open call* sudah tidak lagi digunakan untuk pendanaan siklus berikutnya karena Nusantara Fund tidak ingin membuat komunitas berkompetisi dengan sistem seleksi proposal. Sehingga skema proaktif (*targeted*) diterapkan dengan pemilihan komunitas yang berbasis anggota AMAN, KPA, dan WALHI. Hal ini juga berimplikasi terhadap efektivitas proses pendistribusian dana kepada komunitas, mulai dari pembukaan siklus, pendampingan penyusunan proposal oleh organisasi pendamping di tingkat daerah, proses pelengkapan administrasi, penetapan penerimaan proposal oleh komite persetujuan, proses kontrak, dan pendistribusian dana ke komunitas berlangsung hanya dalam satu bulan.

Siklus 2 yang dimulai pada Mei 2024 telah mendanai 81 inisiatif yang dipilih secara proaktif (*targeted*) berbasis anggota AMAN, KPA, dan WALHI termasuk untuk solidaritas. Dukungan untuk solidaritas pada Siklus 2 dialokasikan sebesar 11% (9 dari 81 proposal). Dukungan pendanaan pada Siklus 2 ini tersebar di 32 provinsi di Indonesia dengan jumlah pendanaan berkisar Rp50.000.000,- (USD3.030) sampai Rp130.000.000,- (USD7.879) setiap inisiatif. Total pendanaan yang didistribusikan untuk Siklus 2 sebesar 7,8 milyar rupiah (USD520.363) yang didukung oleh Packard Foundation, Thousand Currents, dan Ford Foundation.

Siklus 3 yang dimulai pada Desember 2024 telah mendukung pendanaan langsung dengan skema proaktif (*targeted*) seperti yang telah dilaksanakan pada Siklus 2. Sebanyak 93 inisiatif dari anggota (internal) AMAN, KPA, dan WALHI dengan menambah alokasi dukungan untuk solidaritas menjadi 15% (15 dari 93 proposal). Dukungan pendanaan pada Siklus 3 ini tersebar di 29 provinsi, dengan penambahan 2 provinsi dari dua siklus sebelumnya, sehingga total 250 inisiatif dari 3 siklus tersebar di 34 provinsi. Jumlah pendanaan berkisar Rp40.000.000 (USD2.667) sampai Rp100.000.000 (USD6.667) setiap inisiatif. Total pendanaan yang didistribusikan untuk Siklus 3 sebesar 8,1 milyar rupiah (USD546.306) yang didukung oleh Thousand Currents, Ford Foundation, dan Waverly Street Foundation.

ALUR PROSES PENDANAAN LANGSUNG

Seluruh inisiatif yang didanai untuk Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal dapat berkontribusi pada lebih dari satu capaian/target di Nusantara Fund. Dari 250 inisiatif dalam tiga siklus, sebagian besar mendanai untuk target-target model produksi, distribusi, dan konsumsi, serta membangun pusat-pusat pendidikan rakyat. Inisiatif-inisiatif yang didanai ini secara langsung melibatkan dewan adat, kelompok perempuan, pemuda adat, termasuk komunitas pesisir, komunitas yang berada di dataran tinggi, kelompok tani hutan, serikat nelayan, Komunitas Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan komunitas-komunitas yang menghadapi ancaman konflik lahan dan sumber daya alam. Terdapat beberapa konflik sektor yang paling mengancam masyarakat, di antaranya: perkebunan, pertambangan,

distributed in the first cycle is 6.4 billion Rupiahs (USD427,778), derived from the Packard Foundation, Thousand Currents, and the Ford Foundation.

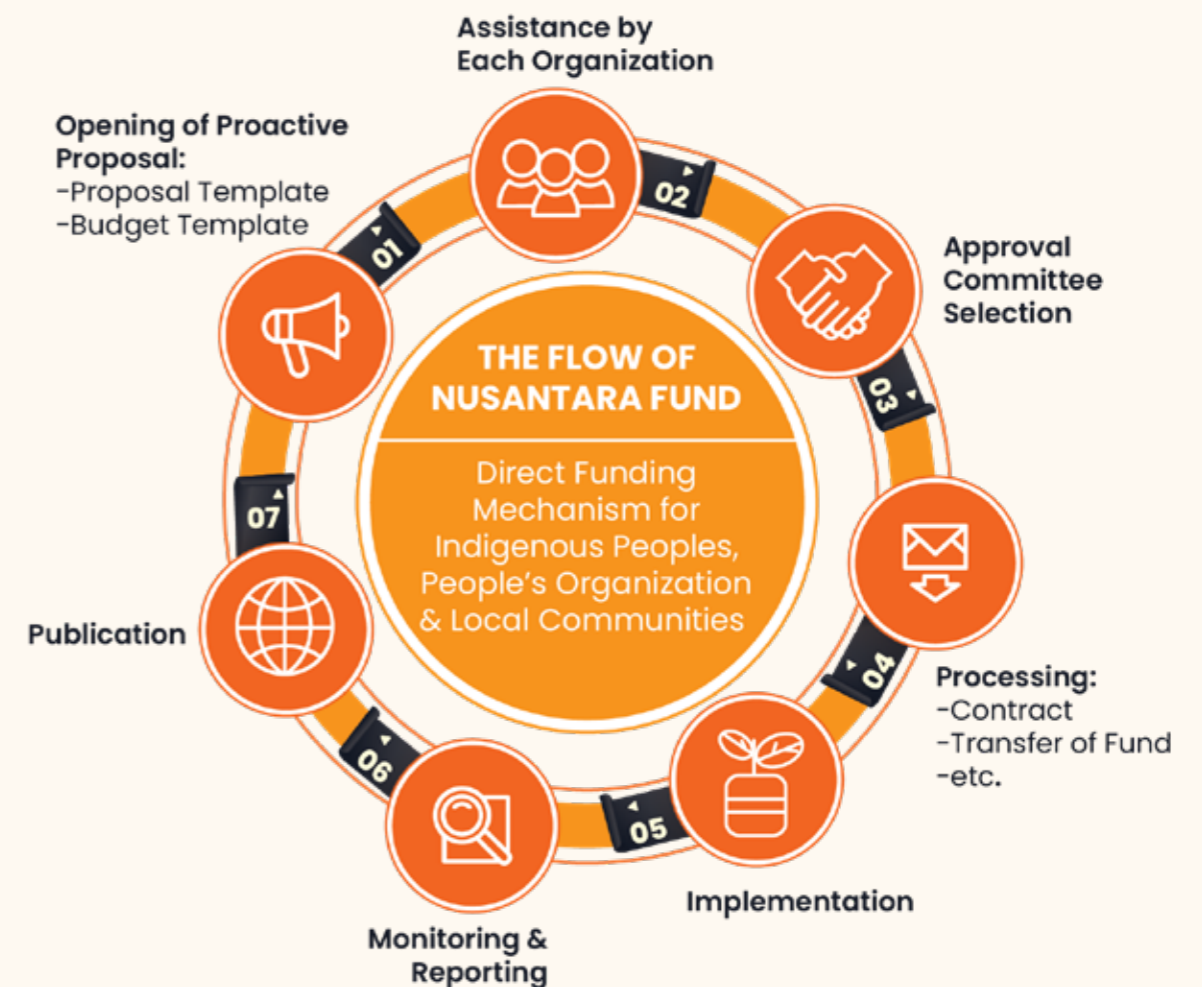
The open call for proposal was no longer used for the next funding cycle because Nusantara Fund does not want to make communities compete with the proposal selection system. Therefore, a proactive (*targeted*) scheme is applied by selecting communities based on AMAN, KPA, and WALHI members. It has then contributed to the effectiveness of the process of distributing funds to communities, starting from the opening of the cycle, assistance in preparing proposals by supporting organizations at the local level, the process of completing the administrative requirements, determining the acceptance of proposals by the approval committee, the contract process, and the distribution of funds to the community. All of which took place in just one month.

Cycle 2, which began in May 2024, has funded 81 proactive (*targeted*) member-based initiatives from AMAN, KPA, and WALHI including for solidarity. In Cycle 2, support for solidarity was allocated 11% (9 out of 81 proposals). Funding support in Cycle 2 was spread across 32 provinces in Indonesia with funding amounts ranging from IDR50,000,000 (USD3,030) to IDR130,000,000 (USD7,879) per initiative. The total funding distributed for Cycle 2 was to 7.8 billion Rupiahs (USD520,363) supported by Packard Foundation, Thousand Currents, and Ford Foundation.

Cycle 3, which began in December 2024, has supported direct funding with a proactive (*targeted*) scheme as implemented in Cycle 2. A total of 93 initiatives from (internal) members of AMAN, KPA, and WALHI with an increased allocation of support for solidarity to 15% (15 out of 93 proposals). Funding support in Cycle 3 was spread across 29 provinces, with the addition of 2 provinces from the previous two cycles, bringing a total of 250 initiatives spread across 34 provinces. Funding amounts ranged from Rp40,000,000 (USD2,667) to Rp100,000,000 (USD6,667) per initiative. Total funding distributed for Cycle 3 was 8.1 billion Rupiahs (USD546,306) supported by Thousand Currents, Ford Foundation, and Waverly Street Foundation.

DIRECT FUNDING FLOW

All funded initiatives for Indigenous Peoples, People's Organizations and Local Communities can contribute to more than one Nusantara Fund outcome/target. Of the 250 initiatives in the three cycles, the majority were funded for targets on production, distribution and consumption models, as well as building people's education centers. These funded initiatives directly engage customary councils, indigenous women's groups, youth, including coastal communities, upland communities, forest farmer groups, fisherfolk unions, Indigenous Peoples, People's Organizations, and communities facing the threat of land and natural resource conflicts. There are several sectors of conflict that threaten communities the most, including: plantations, mining, forestry,



kehutanan, proyek infrastruktur, proyek strategis nasional, reklamasi pesisir, dan industri pariwisata.

Sebanyak 250 inisiatif komunitas menunjukkan resiliensi Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal yang berkolaborasi dengan AMAN, KPA, dan WALHI di masing-masing wilayah melalui ragam bentuk aktivitas:

1. Pemetaan partisipatif;
2. Advokasi untuk hak-hak masyarakat atas wilayahnya;
3. Restorasi dan rehabilitasi ekosistem melalui agroekologi, penanaman kembali beberapa jenis tanaman untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, termasuk pertanian, sebagai upaya untuk adaptasi terhadap perubahan iklim;
4. Meningkatkan efektivitas model produksi berkelanjutan sebagai solusi bagi penghidupan masyarakat dan perlawanan terhadap pendudukan perusahaan;
5. Pusat-pusat pendidikan rakyat seperti:
 - Kelompok tani dan nelayan membangun kapasitas serikat tani dan nelayan, serta jaringannya untuk memperjuangkan hak-haknya;
 - Petani perempuan belajar cara mengatasi hama yang ramah lingkungan;

infrastructure projects, national strategic projects, coastal reclamation, and the tourism industry.

A total of 250 community initiatives demonstrates the resilience of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities who collaborate with AMAN, KPA, and WALHI in each region through various forms of activities as follows:

1. Participatory mapping.
2. Advocacy for community rights over their territory.
3. Ecosystem restoration and rehabilitation through agroecology, replanting several types of plants to increase biodiversity, agriculture, as efforts to adapt to climate change.
4. Improving the effectiveness of sustainable production models as a solution for community livelihoods and resistance to corporate occupation.
5. People's education centers such as:
 - Farmers and fisherfolk groups build the capacity of farmers and fisherfolk unions and their networks to fight for their rights.
 - Women farmers learn how to deal with pests in an environmentally friendly manner.

- Perempuan penenun meningkatkan pengetahuannya mengenai model produksi dan distribusi berkelanjutan;
- Sekolah adat meningkatkan kapasitas pengajar dan pemimpin adat dalam mengelola dan mempertahankan hak, termasuk atas wilayah adatnya;
- Pusat pembelajaran sebagai tempat untuk generasi muda mempelajari pengetahuan adat, keadilan lingkungan, dan meningkatkan generasi muda untuk aksi menyelamatkan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Berdasarkan analisis hasil pelaporan komunitas di tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa capaian kelima target Nusantara Fund:

- **Target 1** telah tercapai 293.782 hektar lahan yang telah berhasil dipetakan;
- **Target 2** telah tercapai 178.249 hektar wilayah adat dan lahan masyarakat yang diusulkan untuk pengakuan atas kepemilikan dan pengelolaan masyarakat;
- **Target 3** tercapai 32.357 hektar lahan yang telah direhabilitasi dan restorasi lahan kritis;
- **Target 4** telah tercapai 116 kelompok usaha ekonomi kolektif yang sudah ada maupun yang baru dibentuk;
- **Target 5** telah tercapai 82 lokasi pendidikan rakyat yang melibatkan 11.053 orang.

Sejauh ini, capaian Nusantara Fund telah berdampak kepada lebih dari tiga juta orang yang didalamnya terdapat 115 Komunitas Masyarakat Adat, 68 Organisasi Tani Lokal, 19 kelompok perempuan, 13 kelompok pemuda, 10 kelompok nelayan, 2 kelompok buruh, dan 54 komunitas lokal dengan total area yang telah diintervensi seluas 1,1 juta hektar. Jumlah capaian ini akan terus meningkat seiring implementasi Siklus 3 yang dimulai pada Desember 2024.

Capaian setiap target yang telah disebutkan di atas menyimpan cerita proses dalam kerja-kerja di tingkat komunitas. Nusantara Fund mendokumentasikan proses dalam bentuk pengalaman, pembelajaran, dan pengetahuan dengan pengelompokan sesuai target yang didapatkan dari implementasi program di setiap komunitas yang didanai pada Siklus 1 dan Siklus 2. Sampai saat ini, telah teridentifikasi sebanyak 206 pengetahuan yang berhasil didokumentasikan yang mayoritas dihasilkan oleh implementasi program dalam bentuk usaha ekonomi dan pusat-pusat pendidikan. Sebanyak 19 pengetahuan baru dihasilkan dari implementasi kegiatan pemetaan; 18 pengetahuan baru dihasilkan dari implementasi kegiatan advokasi untuk mendapatkan legalitas (pengakuan dan perlindungan); 21 pengetahuan baru dihasilkan dari kegiatan rehabilitasi dan restorasi; 79 pengetahuan baru dihasilkan dari kegiatan usaha ekonomi; dan 60 pengetahuan baru dihasilkan dari kegiatan pusat-pusat pendidikan rakyat.

- Women weavers increase their knowledge of sustainable production and distribution models.
- Indigenous schools increase the capacity of indigenous teachers and leaders in managing and defending rights, including over their indigenous territories.
- Learning centers as places for youth to learn about indigenous knowledge, environmental justice, and raise the awareness of youth for action to save the environment and biodiversity.

Based on the analysis of community reporting in 2024, the achievement of the five Nusantara Fund target can be concluded as follows:

- **Target 1** 293,782 hectares of land have successfully been mapped out.
- **Target 2** 178,249 hectares of indigenous territories and community lands have been proposed for recognition under the community's ownership and management.
- **Target 3** 32,357 hectares of land rehabilitated and critical land restored.
- **Target 4** 116 existing and newly formed collective economic business groups.
- **Target 5** 82 community-based education centers established, involving 11,053 people.

By far, the achievements have impacted more than three million people, including 115 Indigenous Peoples, 68 Local Farmer Organizations, 19 women's groups, 13 youth groups, 10 fisherfolk groups, 2 labor unions, and 54 local communities covering a total intervened area of 1.1 million hectares. This number of achievements will continue to increase as the implementation of Cycle 3 has just begun in December 2024.

The achievement of each target mentioned above tells a story about the process of work at the community level. Nusantara Fund documents the process in the form of experience, learning, and knowledge. They are grouped according to the targets obtained from the implementation of programs in each community funded in Cycle 1 and Cycle 2. To date, 206 knowledge have been identified and documented. The majority of which was generated by the implementation of programs related to economic enterprises and education centers. A total of 19 new knowledge was generated from the mapping activities; 18 new knowledge from the implementation of advocacy activities to obtain legality (recognition and protection); 21 new knowledge from rehabilitation and restoration activities; 79 new knowledge from economic business activities; and 60 new knowledge from the activities of community education centers.

TARGET 1

Hasil pemetaan seluas 293.782 hektar lahan wilayah adat, lokasi prioritas reforma agraria, maupun wilayah kelola rakyat terdapat 19 pengetahuan baru yang didapatkan dari implementasi program. Sebagian besar capaian target ini berkolaborasi dengan capaian empat target lain di Nusantara Fund, diantaranya: (1) peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan untuk dapat melakukan pemetaan wilayah secara teknis yang dipahami oleh Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan komunitas baik menggunakan teknologi *Global Positioning System (GPS)*, maupun pesawat nirawak atau *drone* untuk menentukan koordinat batas-batas wilayah secara akurat. (2) penguatan untuk mendorong pengakuan dalam bentuk penguasaan wilayah berdasarkan batas-batas wilayah yang telah dipetakan. (3) termasuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak atas tanah dan sumber penghidupan yang ada di wilayah adat.

Pengetahuan ini sebagai salah satu strategi bagi anggota masyarakat untuk meningkatkan solidaritas gerakan masyarakat untuk terlibat dalam perjuangan pengakuan hak atas tanah, seperti yang dinyatakan oleh Lembaga Masyarakat Desa Sekitar Hutan (LMDH) Lestari Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Adanya pemetaan partisipatif yang melibatkan seluruh struktur adat meningkatkan kontrol dan penguasaan atas wilayah adat. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Pengurus Daerah AMAN Simahieng, Jawa Barat. Contoh lain yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Uma Saerejen, Kepulauan Mentawai. Masyarakat Adat mengenali batas-batas wilayah dan menyadari luasan wilayah adat mereka melalui pemetaan partisipatif, serta meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak atas tanah dan sumber penghidupan yang ada di wilayah adat. Hasil pemetaan yang dilakukan Masyarakat Adat Uma Saerejen, tercatat luas hutan adat Uma Saerejen mencapai 2.400 hektar. Angka itu puluhan kali lebih besar dari yang dibayangkan di awal oleh Masyarakat Adat Uma Saerejen.

“Awalnya diperkirakan sekitar 100 Hektar, setelah didapatkan cerita penemuan tanah ini dan kemudian cerita batas-batasnya digambarkan sketsanya, saya sebagai pendamping yakin tidak akan kecil pasti luas ini wilayahnya.” Jelas Bapak Askurnis, pendamping Masyarakat Adat Uma Saerejen.

Pemetaan wilayah juga salah satu cara untuk mendukung upaya pengakuan dengan dilengkapi pendokumentasian secara tertulis sejarah asal-usul, profil masyarakat, termasuk pengetahuan adat yang berkaitan dengan wilayah mereka. Selain itu, Masyarakat Adat memiliki cara dan pemahaman baru mengenai advokasi wilayah adat dari ekspansi industri melalui pendokumentasian profil dan pemetaan wilayah adat untuk mendapatkan pengakuan. Seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Dayak Tomu n di Kalimantan Tengah dan Masyarakat Adat Dayak Krio Laman Congkong Baru, Kalimantan Barat.

TARGET 1:

There are 19 new knowledge gained from the implementation of mapping program on 293,782 hectares of indigenous territories, priority locations for agrarian reform, and community management areas. Most of the achievements of this particular target are aligned with the achievements of the four other targets, including: (1) capacity building in the form of training on how to conduct technical mapping of territories, which is easier for Indigenous Peoples, People's Organizations, and local communities to understand, either using Global Positioning System (GPS) or drones to accurately determine the coordinates of territorial boundaries; (2) strengthening process to encourage tenure recognition based on the mapped boundaries; (3) awareness raising on land rights and livelihoods in indigenous territories..

This knowledge is one of the strategies for community members to enhance the solidarity of the movement to be involved in the struggle for land rights recognition, as stated by the Lestari Rinjani Forest Community Organization in West Nusa Tenggara Province. The participatory mapping involving all customary structures increases control over customary territories. This is in line with what was stated by AMAN Simahieng Local Chapter, in West Java Province. Another example was demonstrated by the Uma Saerejen, Indigenous Community, in the Mentawai Islands. The Indigenous Peoples identified their boundaries and realized the extent of their customary territories through participatory mapping. At the same time, it raised awareness about their rights to land and livelihoods in their indigenous territories. The mapping done by the Uma Saerejen Indigenous Community recorded that Uma Saerejen's customary forest covers an area of 2,400 hectares. This size is much larger than what they had originally envisioned.

“Initially it was estimated to be around 100 hectares. Upon hearing the story of this land discovery and after its boundaries was sketched, as a facilitator, I was sure that it would not be small, this area is definitely vast.” Explained Mr. Askurnis, a facilitator assisting the Uma Saerejen Indigenous Community.

Territorial mapping is also one way to obtain recognition. The mapping output can be equipped with written documentation of the history of origin, community profile, including customary knowledge related to their territories. In addition, Indigenous Peoples have a new way and understanding of advocating for their territories amidst industrial expansion through documenting profiles and mapping customary territories for recognition. This kind of mapping has been done by the Dayak Tomun Indigenous Community in Central Kalimantan and the Dayak Krio Laman Congkong Baru Indigenous Community in West Kalimantan.

“Karena kami ingin selalu melestarikan apa yang kami miliki saat ini agar tidak hilang begitu saja maka dari itu kami melakukan pengusulan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat supaya kami diakui sebagai Masyarakat Adat.” Masyarakat Adat Dayak Tomun, Kalimantan Tengah.

“Perjuangan ini cukup panjang ketika dari pemetaan partisipatif dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam bentuk lokakarya, diskusi dan lainnya namun belum sepenuhnya masyarakat sadar akan pentingnya mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Jadi kita masyarakat semuanya bisa menyadari akan pentingnya bekerja sama dan kompak dalam mengelola dan mempertahankan wilayah adat.” Kanisius Katik, Domong Adat Dayak Krio Laman Congkong Baru.

“Kegiatan ini sangat penting, mengingat ancaman terhadap sumber daya alam semakin tinggi, selain masuknya beberapa investasi, penyerobotan atau klaim dari warga di luar Congkong Baru juga terjadi atau bahkan dengan cara mencuri sumber daya alam yang di wilayah adat Congkong Baru. Kita berharap proses ini setidaknya bisa mengatasi hal-hal tersebut, dengan tetap kompak dalam mengelola sumber daya yang terus-menerus sampai anak cucu kita nanti.” S.Kiak, Mantir Laman Congkong Baru.

TARGET 2

Hasil pengakuan wilayah seluas 178.249 hektar wilayah adat, hutan adat, Lokasi Prioritas Reforma Agraria, dan wilayah kelola rakyat yang berhasil diusulkan oleh Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal dalam implementasi program menghasilkan 18 pengetahuan baru dalam beberapa bentuk, di antaranya: (1) pengamanan wilayah dengan menguatkan kapasitas gerakan generasi muda melalui ragam bentuk pendidikan kritis. (2) penguatan kapasitas advokasi bagi seluruh anggota komunitas termasuk kelompok perempuan untuk mempertahankan hak-hak Masyarakat Adat dalam rangka mendukung upaya perlindungan dan pengakuan di wilayah mereka. (3) masyarakat memiliki strategi baru dalam mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan dengan membentuk tim kecil dengan melibatkan kepala adat, pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah di tingkat kabupaten yang bekerja sama untuk mendesak pemerintah kabupaten agar dapat melakukan percepatan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. (4) Masyarakat Adat memiliki strategi untuk melindungi ekosistem sungai melalui penetapan peraturan *lubuk larangan* di tingkat komunitas. (5) masyarakat memiliki pengetahuan pendokumentasian secara tertulis mengenai sejarah dan peta wilayah Masyarakat Adat untuk pengakuan dan perlindungan hukum. (6) komunitas masyarakat memiliki strategi baru untuk mendapatkan izin kelola lahan Kesultanan Yogyakarta melalui riset dan pemetaan partisipatif.

Proses yang didukung oleh Nusantara Fund berada pada tahap-tahap yang beragam mulai dari penyiapan kelengkapan dokumen usulan, seperti penetapan peta wilayah, audiensi ke pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk mendorong percepatan perlindungan dan pengakuan, penyusunan profil dan sejarah masyarakat, pembentukan tim kecil untuk mendukung

“Because we want to always preserve what we have today so that it would not disappear, we are proposing the recognition and protection of Indigenous Peoples so that we are fully recognized as Indigenous Peoples.” Dayak Tomun Indigenous Community, Central Kalimantan.

“This struggle is quite long, with participatory mapping and other activities like workshops, discussions and others, but not fully aware of the importance of sustainably managing natural resources. So, we as a community can all realize the importance of working together and being united in managing and defending indigenous territories.” Kanisius Katik, Domong Adat Dayak Krio Laman Congkong Baru.

“This activity is very important, considering the growing threat to natural resources, in addition to the entry of several investments, land grabbing or claims from residents outside Congkong Baru or even by stealing natural resources in the Congkong Baru indigenous territories. We hope that this process can at least overcome these issues, by maintaining unity in managing resources that will be continued for our children and grandchildren.” S.Kiak, Mantir Laman Congkong Baru

TARGET 2

The recognition of 178,249 hectares of indigenous territories, customary forests, Agrarian Reform Priority Locations, and community-management areas proposed by Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities in the implementation of the program resulted in 18 new knowledge in several forms, including: (1) securing territories by strengthening the capacity of the youth movement through various forms of critical education. (2) strengthening advocacy capacity for all community members including women's groups to defend the rights of Indigenous Peoples to support protection and recognition efforts in their territories. (3) the community has a new strategy to encourage the recognition and protection by forming a small team involving customary chiefs, the government at the village, sub-districts, and district levels who work together to urge the district government to speed up the formulation of the Local Government Regulation (*Perda*) on the Recognition and Protection of Indigenous Peoples. (4) Indigenous Peoples have strategies to protect river ecosystems through the adoption of *lubuk larangan* rules at the community level. (5) communities have the knowledge to document in writing the history and maps of the IPs' territories for legal recognition and protection. (6) the community has a new strategy to obtain the Yogyakarta Sultanate's land management license through participatory research and mapping.

The process supported by Nusantara Fund is carried out in various stages, starting from the preparation of proposal documents, demarcation maps, hearings with local governments both at the district and provincial levels. These to encourage the acceleration of protection and recognition, preparation of community profiles and histories, formation of small teams to support the acceleration

percepatan pengakuan hingga peningkatan pengetahuan hukum dan advokasi masyarakat untuk melakukan pembelaan hukum dari ancaman okupasi lahan.

Pengamanan wilayah dengan menguatkan kapasitas kelompok perempuan dan generasi muda melalui ragam bentuk pendidikan kritis seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun, Jambi yang kehilangan hutan dan tanah adat akibat perubahan fungsi menjadi perkebunan sawit perusahaan skala besar. Penguatan kapasitas advokasi untuk mempertahankan hak-hak Masyarakat Adat Orang Rimba penting dilakukan untuk mendukung upaya perlindungan dan pengakuan di wilayah mereka. Melalui program ini, Masyarakat Adat Orang Rimba berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak dan ruang wilayah adat. Termasuk didalamnya kelompok perempuan untuk lebih berani menyuarkan hak-haknya di hadapan pemerintah dan perusahaan sawit.

Upaya lain yang dilakukan oleh kelompok muda Fakawele di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara yang sedang menghadapi ancaman industri hilirisasi nikel yang merusak wilayah adat mereka. Hal ini berdampak terhadap rusaknya ekosistem hutan dan sungai yang berakibat tercemarnya pesisir laut, polusi udara atau debu dari aktivitas industri. Tidak hanya itu, tradisi, kebiasaan, dan pengetahuan Masyarakat Adat perlahan hilang akibat masuknya industri tambang. Sehingga komunitas berinisiatif merevitalisasi pengetahuan adat melalui pendidikan kritis, inventarisasi pengetahuan, dan pengelolaan perpustakaan dalam rangka memperkuat kapasitas Masyarakat Adat khususnya pemuda akan hak-hak mereka sebagai bentuk solidaritas gerakan untuk menolak industri ekstraktif yang berada di wilayah adat.

Isnain Fabanyo, salah satu anggota Fakawele mengakui “Adanya kegiatan ini bisa mengasah mental, menambah pengetahuan dan pengalaman betapa pentingnya kita menjaga dan mempertahankan alam, wilayah sekitar serta budaya dan terutama betapa pentingnya menjaga sumber daya alam terhindar dari ancaman tambang.”

Contoh lain yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Balai Juhu di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan yang memiliki strategi baru dalam mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat dengan membentuk tim kecil yang melibatkan kepala adat, pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah di tingkat kabupaten yang bekerja sama untuk mendorong dan mendesak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar dapat melakukan percepatan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

“Untuk Produk Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemerintah Daerah terkesan lamban dan saling lempar antara eksekutif dan legislatif. Panitia Masyarakat Adat yang sudah ada sejak tahun 2019 pun sama sekali tidak ada perkembangan dan tindak lanjut. Akibat dari ketidakseriusan pemerintah dalam membuat produk hukum ini, melalui program dari Nusantara Fund maka PD AMAN Hulu Sungai Tengah dapat

of recognition, improvement of legal knowledge and community advocacy to carry out legal defense from the threat of land occupation.

Securing territories by strengthening the capacity of women’s groups and the youth through various forms of critical education was carried out by the Orang Rimba Indigenous Peoples in Sarolangun District, Jambi, who lost their forests and customary lands due to conversion into a large-scale corporate oil palm plantation. Strengthening the advocacy capacity to defend the rights of Orang Rimba Indigenous Peoples is important to enhance protection and recognition efforts in their territories. Through this program, Orang Rimba Indigenous Peoples have increased their awareness and understanding regarding the rights and space of indigenous territories. This includes women’s groups to be braver in voicing their rights before the government and palm oil companies.

Another effort was made by the Fakawele youth group in Central Halmahera District, North Maluku, who are facing the threat of the nickel downstream industry destroying their indigenous territory. This has caused destruction of forest and river ecosystems which resulted in polluted coastal areas, air pollution or dust from industrial activities. Besides, the traditions, habits and knowledge of Indigenous Peoples are slowly disappearing due to the entry of the mining industry. Therefore, the community took the initiative to revitalize indigenous knowledge through critical education, knowledge inventory, and library management to strengthen their capacity on IPs’ rights, especially the youth, as a form of solidarity movement to reject extractive industries in indigenous territories.

Isnain Fabanyo, a member of Fakawele acknowledges that “The existence of this activity can hone mentality, increase knowledge and experience on how important it is for us to protect and defend nature, the surrounding area, and culture, and especially how important it is to protect natural resources from mining threats.”

Another example is carried out by the Balai Juhu Indigenous Peoples in Hulu Sungai Tengah, South Kalimantan. They have a new strategy to accelerate the recognition and protection of Indigenous Peoples by forming a small team involving indigenous leaders, village, sub-district, and even district governments, working together to encourage and urge the Hulu Sungai Tengah District Government to accelerate the enactment a Local Government Regulation (*Perda*) on the Recognition and Protection of Indigenous Peoples in Hulu Sungai Tengah District.

“As for the local regulation on the Recognition and Protection of Indigenous Peoples in Hulu Sungai Tengah District, the local government has been slow to act. Besides, the executive and legislative branches of government have not made any progress. The Indigenous Peoples Committee, which has existed since 2019, has had no updates and follow-ups. Considering the lack of government commitment, AMAN Hulu Sungai Tengah Local Chapter, through the Nusantara

membentuk Tim Kecil menyerahkan Draft Perda dan Naskah Akademik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Melakukan komunikasi dengan DPRD terpilih yang baru. Melakukan perjanjian dengan pasangan calon agar nanti jika terpilih akan segera mengesahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.” Yulius Tanang, Ketua PD AMAN Hulu Sungai Tengah.

TARGET 3

Lahan seluas 32.357 hektar yang berhasil direhabilitasi melalui inisiatif-inisiatif Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal dalam rangka memulihkan lahan kritis dilaksanakan dengan mengkombinasikan dengan aktivitas lain utamanya untuk berkontribusi terhadap capaian Target 4 mengenai ekonomi. Sebanyak 21 pengetahuan baru dihasilkan dari kegiatan rehabilitasi dan restorasi, di antaranya: masyarakat memiliki strategi penanaman jenis tanaman yang digunakan adalah tanaman pangan yang memiliki kemampuan untuk memulihkan kualitas tanah dan air, sekaligus digunakan untuk pemenuhan ekonomi karena memiliki nilai jual. Beberapa jenis tanaman pangan yang digunakan oleh masyarakat untuk rehabilitasi di antaranya: tanaman kopi, aren, cengkeh, pala, petai, dan tanaman buah durian, alpukat serta tanaman lokal lainnya. Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya semata-mata untuk memulihkan lahan. Ada beberapa kelompok masyarakat yang melakukan penanaman dalam rangka penguasaan/pendudukan lahan secara fisik di wilayah yang sedang berkonflik. Selain itu juga terdapat kegiatan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan tradisi dan pengetahuan lokal tentang jenis-jenis tanaman yang sudah tidak dapat ditanami lagi karena adanya penyesuaian kondisi lahan. Termasuk upaya untuk memulihkan habitat satwa endemik di hutan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan keanekaragaman jenis yang berada di dalamnya. Seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Adat di Desa Rebi, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku yang mampu memulihkan Hutan Adat Nara dengan penanaman jenis cengkeh dan pala untuk mendukung kelangsungan hidup satwa endemik burung cendrawasih.

Inisiatif lain dilakukan oleh masyarakat di Gampong Jambo Reuhat, Kabupaten Aceh Timur dalam upaya mempertahankan wilayah mereka yang berbatasan langsung dengan area perkebunan sawit milik perusahaan skala besar. Masyarakat memiliki inisiatif untuk melakukan pembibitan tanaman pangan untuk kemudian ditanam di area perbatasan dengan perkebunan sawit sebagai salah satu upaya pendudukan langsung. Selain itu, pemilihan jenis tanaman pangan ini (kopi, pala, coklat, petai, dan lada) juga merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan tradisi budidaya tanaman pertanian yang telah lama ditinggalkan akibat perubahan jenis tanaman sawit yang mendominasi wilayahnya dan menyebabkan terdegradasi lahan sehingga tidak cocok ditanam tanaman pangan.

Dalam upaya pemulihan lahan dengan cara rehabilitasi, juga berhubungan langsung dengan cara pemulihan tata air di suatu wilayah. Kondisi lahan kritis diakibatkan salah satunya oleh tidak

Fund program, was able to form a small team to submit the draft local regulation and academic paper to the Hulu Sungai Tengah local parliament (DPRD) leadership. And further communicate with the newly elected local MPs. This small team also made a deal with the candidate pair so that if elected, they will immediately ratify the Local Government Regulation on the Recognition and Protection of Indigenous Peoples.” Yulius Tanang, Chair of AMAN Hulu Sungai Tengah Local Chapter.

TARGET 3

Around 32,357 hectares of land were successfully rehabilitated through the initiatives of Indigenous Peoples, People’s Organizations, and Local Communities. This was done to restore critical land by combining with other activities mainly to contribute to the achievement of Target 4 on the economy. A total of 21 new knowledge was generated from rehabilitation and restoration activities including the community’s strategy for planting food crops that can restore soil and water quality, as well as being used for economic fulfillment because they have a selling value. Some types of food crops used by the community for rehabilitation such as coffee, *aren* palm, cloves, nutmeg, stink bean (*petai*), durian, avocado and other local plants. The rehabilitation activities carried out by the community does not only aim to restore the land. There are several community groups who did this planting to physically control/occupy land in disputed areas. In addition, there are rehabilitation activities to restore local traditions and knowledge about plant species that can no longer be planted due to adjustments in land conditions. This includes efforts to restore endemic animal habitats in the forest as a way to maintain the diversity of species in it. The activity is similar to the one done by the Indigenous People in Rebi Village, Aru Islands Regency, Maluku, who were able to restore the Nara Customary Forest by planting clove and nutmeg species to support the survival of endemic birds of paradise.

Another initiative was done by Gampong Jambo Reuhat, community in Aceh Timur District to maintain their territory that directly adjacent to a large-scale corporate oil palm plantation. The community has the initiative to conduct food crop nurseries and then plant them in the border area with oil palm plantation. This is one of the efforts of direct occupation. In addition, the selection of these food crops (coffee, nutmeg, cocoa, stink bean, and pepper) is also an effort to restore the agricultural tradition of crop cultivation that has long been abandoned due to oil palm that dominates the area and causes land degradation, making it unsuitable for planting food crops .

Land restoration efforts by means of rehabilitation are directly related to the restoration of water systems in an area. Land degradation is caused by poorly managed water sources, which also affect the

terkelola dengan baik sumber air yang juga berdampak terhadap produktivitas tanaman yang dipelihara di atasnya. Namun, hal ini tidak menjadi tantangan bagi komunitas, seperti yang dihadapi oleh kelompok petani kopi di Desa Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Masyarakat memulihkan area perkebunan kopi yang semula merupakan kawasan kering, tandus, dan kerap mengalami kebakaran akibat tidak adanya pohon yang tumbuh dan minimnya pasokan air ke kawasan ini. Inisiatif yang dilakukan kelompok masyarakat di Desa Ibun adalah dengan memulihkan lahan tersebut dengan menanam jenis tanaman berkayu keras, serta ditanami jenis kopi yang diselingi dengan tanaman sayuran, jeruk, alpukat dan tanaman keras lainnya seperti ekaliptus, rasamala. Masyarakat mempunyai strategi pemenuhan kebutuhan air bagi kebunnya melalui penyediaan sistem irigasi dengan penggunaan pompa hidram.

“Kesulitan sumber air di kawasan kelola KPS Mulyatani I Desa Ibun merupakan permasalahan utama bagi kami dalam memulihkan atau menghutankan kembali kawasan kelola kami. Pendanaan langsung yang dipergunakan untuk pengairan lahan melalui pipanisasi dan sistem hidram pump dapat mempercepat pemulihan kawasan hutan dan dapat meningkatkan produktivitas tanaman petani anggota KPS Mulyatani I Desa Ibun dengan produk unggulan kopi.” Aceng Samsudin, penanggung jawab program.

Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok masyarakat di Desa Henda, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran lahan di wilayah mereka, masyarakat berinisiatif membangun sekat bakar sepanjang 4.000 meter dalam rangka melindungi kawasan hutan seluas 100 hektar dari ancaman kebakaran sehingga dapat menjaga keseimbangan ekosistem gambut yang akan menjadi tempat perlindungan tanaman dan satwa di dalamnya. Di sepanjang sekat bakar yang dibangun, masyarakat juga melakukan penanaman pohon lokal jenis belangiran dan durian lokal untuk mendukung pencegahan kebakaran.

“Kami bersyukur dengan adanya program Nusantara Fund ini sehingga saat ini kelompok komunitas kami menjadi bangkit kembali dan memiliki sumber daya di antaranya mesin dan sumur bor yang bisa kami gunakan untuk menjaga hutan maupun kawasan kami dari bencana yang selalu mengintai dan mengancam kelestarian hutan kami.” Indra, penanggung jawab program.

TARGET 4

Capaian hasil dalam usaha ekonomi yang didukung melalui pendanaan langsung ini merupakan sebuah upaya untuk dapat menciptakan model produksi, distribusi, dan konsumsi yang dibangun oleh Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal. Terdapat 79 pengetahuan baru yang dihasilkan, di antaranya: bentuk-bentuk usaha ekonomi yang dibangun mengutamakan pengelolaan secara kolektif yang memberikan manfaat bagi anggota secara adil dan membagi hasilnya untuk mendukung kemandirian organisasi. Pengelolaan secara kolektif dan prinsip adil dalam pembagian hasil yang dibangun Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas

productivity of the crops grown on it. However, this is not the type of challenge faced by a community of coffee farmers in Ibun Village, Bandung District, West Java. The community is restoring a coffee plantation area that was originally a dry, barren area, and often experienced fires due to the absence of growing trees and the lack of water supply. The initiative taken by community in Ibun Village is to restore the land by planting hardwood plants, and coffee species accompanied by vegetables, oranges, avocados and other hardwood plants such as eucalyptus and *rasamala*. The community has a strategy to water for their farming land through the application of irrigation systems with the use of hydram pump.

“The scarcity of water sources is a major problem for the KPS Mulyatani I in Ibun Village when it comes to restoring or reforesting our management area. Direct funding used for land irrigation through pipelines and hydram pump systems can accelerate the recovery of forest areas and can increase the productivity of crops grown by KPS Mulyatani I member farmers in Ibun Village. In this land, the main product is coffee.” Aceng Samsudin, program PIC.

The same thing was done by local community in Henda Village, Pulang Pisau District, Central Kalimantan. To reduce the risk of land fires in their area, the community took the initiative to build a 4,000-meter firebreak to protect a 100-hectare forest area from the threat of fire, thereby maintaining the balance of the peat ecosystem that will serve as a refuge for plants and animals. Along the firebreaks, the community also planted local trees like *belangiran* and durian to enhance fire prevention.

“We are grateful for the Nusantara Fund because now our community group stand on their feet and have resources such as machines and boreholes that we can use to protect our forests and territory from disasters that always lurk and threaten the sustainability of our forests.” Indra, program PIC.

TARGET 4

The milestone in economic enterprises supported by direct funding is an effort by Indigenous Peoples, People’s Organizations and Local Communities to create production, distribution and consumption models. There are 79 new knowledge generated, including the economic businesses built to prioritize collective management that provides equal benefits to all members and shares the profit to support the independence of the organization. Collective management and the principle of fairness in the distribution of profit built by Indigenous Peoples, People’s Organizations and Local Communities aim to

Lokal yang berusaha mengatasi permasalahan ekonomi yang tidak ada jalan keluarnya, seperti ketergantungan terhadap tengkulak dalam proses pemasaran dan permasalahan hutang. Bentuk-bentuk kegiatan mereka mulai dari pengolahan lahan untuk pertanian organik, peternakan, kebun kolektif, koperasi, dan pengembangan strategi pemasaran, termasuk kegiatan pelatihan untuk mendukung peningkatan produktivitas hasil.

Penguatan ekonomi juga dilakukan sebagai bagian untuk memperkuat soliditas gerakan yang secara langsung juga dikelola oleh kelompok perempuan dengan keterlibatan dalam proses produksi. Meningkatkan semangat anggota untuk lebih terlibat secara aktif dalam kerja-kerja di organisasi. Seperti inisiatif yang dilakukan oleh Serikat Nelayan Indonesia di Desa Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat membangun ekonomi kerakyatan keluarga nelayan melalui pengembangan olahan rajungan atas inisiatif kelompok perempuan. Anggota serikat nelayan mengembangkan model usaha ekonomi alternatif dengan menambah rantai produksi rajungan, sehingga meningkatkan nilai jual dan mampu meningkatkan ekonomi nelayan perempuan dalam rantai produksi yang baru.

“Selama ini rajungan yang dipasarkan oleh para nelayan selalu dijual utuh tanpa dikupas yang menjadi nilai tambah dan pemasukan khususnya bagi para perempuan. Sehingga program ini sangat disambut antusias oleh para perempuan nelayan. Nelayan rajungan bisa dilokalisir untuk bisa menjual daging dan para istri nelayan bisa ikut terlibat dan mengupasnya menjadi daging. Sehingga mata rantai penjualan rajungan bisa dimanfaatkan secara nilai tambah. Dengan adanya pengelolaan rumah olahan rajungan para kelompok perempuan menyepakati adanya tabungan bersama yang dikelola oleh perempuan nelayan itu sendiri.” **Jamhuri, penanggungjawab program.**

Dalam penguatan ekonomi di komunitas kelompok pemuda juga memiliki peran penting untuk terlibat aktif untuk menerapkan pengetahuan dan mengajak anggota komunitas secara luas, seperti yang dilakukan oleh Pemuda Adat Komunitas Adat Tanak Sembahulun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kelompok pemuda yang tergabung dalam Badan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Sembalun melakukan inisiatif pengembangan produk usaha kopi sebagai suatu strategi pengumpulan dana kolektif. Hasil dari produksi kopi ini juga digunakan untuk membantu pendampingan hukum, advokasi, legalisasi wilayah adat dan masyarakat yang diadili akibat konflik lahan dengan perusahaan tambang emas.

“Anggota BPAN Daerah Sembalun, Komunitas Tanak Sembahulun sangat antusias menyambut program ini karena ada dukungan untuk pengadaan alat untuk pengembangan produksi kopi pemuda adat tanak Sembahulun. Hal ini untuk meningkatkan penghasilan dalam usaha kopi serat meningkatkan keterlibatan pada pembelaan dalam tanah adat yang ingin diambil oleh perusahaan. Dukungan ini adalah dukungan untuk mempertahankan hak masyarakat adat atas tanah adatnya untuk bertahan dalam mengelola untuk bertani dan berkebun.” **Abdul Robi, penanggungjawab program.**

overcome economic problems that seem to have no way out, such as dependence on middlemen in the marketing process and debt issues. Their activities range from land cultivation for organic farming, animal husbandry, collective farming, cooperatives, and development of marketing strategies, including training activities to support increased productivity of their products.

Economic strengthening is also carried out as part of enhancing the solidity of the movement, which is directly managed by women's groups through involvement in the production process. Encouraging members to be more actively involved in the work of the organization such as the initiative undertaken by the Indonesian Fishermen's Union in Gebang Village, Cirebon District, West Java. They built the economy of fishing families through the blue swimming crab processing at the initiative of the women's group. Members of the fishermen's union developed an alternative business model by adding to the crab production chain, thus increasing the selling value and being able to improve the economy of fisherwomen in the new production chain.

“By far, the blue swimming crabs have always been sold whole without being peeled. Selling the meat only without the carapace is an added value and income, especially for the women. Therefore, this program is very much welcomed by fisherwomen. Crab fishermen are organized to be able to increase the selling value of crab which was previously only sold in whole with the carapace attached, now it can process it into crab meat products involving the fishermen's wives and has met market standard. With the management of the crab processing house, the fisherwomen agreed on a joint saving account managed by the fisherwomen themselves.” **Jamhuri, Program PIC**

In strengthening the economy in the community, youth also have an important role to play. They are actively involved in applying knowledge and inviting community members at large, as done by the Indigenous Youth of Tanak Sembahulun Indigenous Community, East Lombok District, West Nusa Tenggara. The youth group which is a member of AMAN Indigenous Youth Front (BPAN) in Sembalun initiated a coffee business as a collective fundraising strategy. The proceeds from this coffee production are also used to provide legal assistance, advocacy, legalization of indigenous territories and help community members that are on trial due to land conflicts with a gold mining company.

“Members of BPAN Sembalun Local Chapter and Tanak Sembahulun Community enthusiastically welcomed this program because it provides support for the procurement of tools for the establishment of coffee production by indigenous youth in Tanak Sembahulun. This is to increase our income from coffee business and to strengthen involvement in the defense of customary land that the company wants to grab from us. This support is to defend the IPs' rights to their customary land. It is important for them to survive in managing the land for agricultural and farming purposes.” **Abdul Robi, Program PIC.**

Hal lain, usaha ekonomi juga dijadikan sebagai sarana untuk mengembalikan tradisi atau pengetahuan lokal yang sebelumnya telah lama ditinggalkan. Hal ini yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pangan, seperti inisiatif yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Nanggala di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Masyarakat memiliki strategi baru untuk reaktivasi praktik penanaman padi dan budidaya ikan di lahan Masyarakat Adat menggunakan metode mina padi yang telah ditinggalkan sebelumnya. Begitupun yang dilakukan oleh Kelompok Perempuan Penenun Maju Bersama di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Kelompok ini menemukan strategi yang mengembalikan tradisi penggunaan bahan pewarna alami sebagai bahan pembuatan Tenun Songket Silungkang yang sempat berhenti produksi akibat lemahnya penjualan akibat pandemi Covid-19.

Pengelolaan ekonomi secara kolektif di Komunitas Nelayan Tambakrejo, Kota Semarang, Jawa Tengah membangun kemandirian masyarakatnya untuk tidak bergantung kepada bantuan sosial. Model ekonomi terintegrasi yang berhasil menggabungkan pengelolaan hasil laut melalui rumpon untuk budidaya kerang hijau dengan wisata pemancingan laut dan wisata air (susur sungai dan susur laut) yang disertai dengan pelatihan koperasi serta berhasil menyepakati pembentukan Koperasi Kampung Nelayan Tambakrejo Sejahtera. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan posisi tawar Masyarakat Tambakrejo dalam mendapatkan kembali hak atas tanah termasuk hak ruang tangkapnya yang terancam oleh proyek normalisasi sungai pemerintah.

“Pasca terjadinya pengusuran pada 2019, intensitas bantuan sosial dan bantuan langsung banyak didapat komunitas. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketergantungan tinggi (kecanduan) bantuan langsung. Berbagai pelatihan dan pendidikan dari program ini memunculkan kesadaran bagi para pengurus koperasi untuk mulai mencari solusi masalah ketergantungan komunitas Tambakrejo terhadap bantuan sosial dengan cara menciptakan ekonomi mandiri di Komunitas Tambakrejo.” Iqbal, penanggungjawab program.

TARGET 5

Pembentukan pusat-pusat pendidikan rakyat yang telah melibatkan sebelas ribu orang di 82 lokasi dalam bentuk inisiatif-inisiatif Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal untuk revitalisasi, inovasi, dan kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas serta pengetahuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam mempertahankan, melindungi, dan mengelola tanah, wilayah, serta sumber daya mereka. Terdapat 60 pengetahuan baru dihasilkan dari kegiatan pusat-pusat pendidikan rakyat ini antara lain: (1) tentang perluasan basis gerakan dan soliditas juga visi yang konkret tentang Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) pasca Redistribusi Tanah juga soliditas gerakan Masyarakat Adat dari peningkatan pengetahuan adat dan ekologi. (2) peningkatan kapasitas pengajar dalam metode pembelajaran di Sekolah Adat. (3) juga anggota serikat tani yang memiliki kapasitas untuk mengajarkan pengetahuan advokasi terkait konflik agraria kepada serikat, pengetahuan dan strategi baru dalam mengatasi gagal panen padi ladang. (4) peningkatan pengetahuan

On the other hand, economic enterprises are also used to restore traditions or local knowledge that had previously been abandoned. This is directly related to the fulfillment of food needs, like the initiative undertaken by the Nanggala Indigenous Community in North Toraja District, South Sulawesi. The community has a new strategy to reactivate the practice of rice cultivation and fish farming on Indigenous land using the previously abandoned mina padi method. Likewise, the Maju Bersama Women's Weaving Group in Sawahlunto City, West Sumatra, is trying to do the same. This group found a strategy that restores the tradition of using natural dyes as an ingredient in making Silungkang Songket Woven Fabric, which had stopped production due to weak sales during the Covid-19 pandemic.

Collective economic management in the Tambakrejo Fishermen Community, Semarang City, Central Java builds the independence of the community, being not dependent on social aid. An integrated economic model that successfully combines the management of marine products and the use of FADs for green mussel cultivation with fishing trip and water tourism activities (river cruising and sea cruising). It is also combines with a training on cooperative and an agreement on the establishment of the Tambakrejo Sejahtera Fishing Village Cooperative. It is an effort to improve the bargaining position of the Tambakrejo Community in reclaiming land rights including the right to fishing grounds threatened by the government's river normalization project.

“After the eviction in 2019, there was increased intensity of direct social aid in the community. This has led to high dependence (addiction) on direct support. Various trainings and education from this program have raised awareness for cooperative administrators to start looking for solutions to the dependency issue by creating an independent economy in the Tambakrejo Community.” Iqbal, Program PIC.

TARGET 5

The establishment of people's education centers that have involved eleven thousand people in 82 locations. They are initiatives of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities for revitalization, innovation, and collaboration in increasing the capacity and knowledge of Indigenous Peoples and Local Communities in defending, protecting, and managing their lands, territories, and resources. There are 60 new knowledge generated from the activities in these people's education centers, among others: (1) the expansion of the movement base and solidity as well as a concrete vision of an Advanced Agrarian Reform Village (DAMARA) after Land Redistribution as well as the solidity of the Indigenous Peoples movement stemming from increased indigenous and ecological knowledge. (2) increased capacity of teachers in learning methods at the Indigenous School. (3) farmer union members have the capacity to teach advocacy knowledge related to agrarian conflicts to the union, new knowledge and strategies in overcoming crop failure in rainfed paddy fields. (4) increased knowledge of young people about saving the environment

orang muda tentang penyelamatan lingkungan juga menjaga ekosistem pesisir dan perempuan tentang budidaya tanaman pangan. (5) strategi revitalisasi adat akibat *over tourism* melalui kurikulum sekolah adat yang melibatkan ahli. (6) cara memobilisasi keswadayaan untuk memastikan akses pendidikan anak petani anggota serikat, dan strategi dan cara baru perlawanan nelayan melalui rehabilitasi ekosistem pesisir juga pelibatan perempuan dan orang muda dalam pengolahan hasil tangkapan.

Serikat Petani Pasundan (SPP) Pangandaran memiliki strategi baru memobilisasi keswadayaan untuk memastikan akses pendidikan anak petani anggota SPP Pangandaran di lima desa dan tersedianya lahan kolektif percontohan yang digunakan untuk praktik pendidikan serta penelitian pertanian.

“Dalam awal proses pembangunan, SPP Sangat antusias karena pembangunan sekolah SMP ini yang pertama dibangun oleh SPP di Kabupaten Pangandaran. Sehingga ini menjadi kebanggaan buat kita semua sebagai anggota SPP di Pangandaran, bisa mewujudkan sekolah SMP Pasir Pilar Pertanian. Sehingga kecemasan terkait akses Pendidikan anak dari anggota serikat petani SPP Pangandaran sudah terjawab melalui pembangunan sekolahan tersebut.” Ilyas, penanggungjawab program.

Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Pusu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang melakukan strukturisasi sekolah adat dengan pembuatan kurikulum. Peran Perempuan Adat juga diperhatikan sehingga dapat berkontribusi bagi operasional sekolah adat melalui hasil usaha kolektif termasuk praktik pembelajaran di lahan kolektif Masyarakat Adat.

Inisiatif lain dalam hal revitalisasi pengetahuan adat dilakukan oleh Masyarakat Adat Kaum Datuk Rangkayo Endah, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berupaya mengembalikan tradisi dan pengetahuan yang mulai pudar yaitu dengan mendirikan pondok belajar sebagai pusat pendidikan adat dan ekologi.

“Kondisi hari ini, membawa mamangan adat ‘Anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan’, susah bertemu dan jarang didapat. Banyak faktor pendukung yang telah bergeser. Pergeseran fungsi Surau adalah salah satunya, tidak ditemukan lagi pemuda yang tidur menginap di Surau, berkurangnya minat generasi muda dalam mendalami Silek. Kehadiran pondok belajar adat dan ekologi di Jorong Duo Koto, membawa semangat untuk mewarnai kembali corak yang membayang dan sudah mulai pudar tersebut. Semangat untuk menemukan kembali fungsi surau, semangat untuk menemukan kembali hakekat ulayat, menjiwai berbagai peran dalam sistem sosial.” Riya Dharma, penanggungjawab program.

as well as maintaining coastal ecosystems and of women about food crop cultivation. (5) Indigenous revitalization strategies due to over tourism through an indigenous school curriculum involving experts. (6) how to mobilize self-help to ensure access to education for children of farmers who are members of the union, and new strategies and ways of fishermen’s resistance through rehabilitating coastal ecosystems as well as involving women and youth in processing catches.

Pasundan Farmers Union (SPP) Pangandaran has a new strategy to mobilize self-help to ensure access to education for children of SPP Pangandaran member farmers in five villages and the availability of demo land used for agricultural education and research practices.

“In the beginning of the construction process, the union was very enthusiastic because the construction of this junior high school was the first ever built by the union in Pangandaran District. The union members are very proud to be able to build the Pasir Pilar Agricultural Junior High School in Pangandaran. The concern regarding access to education for children of the union members has been addressed through the establishment of the school.” Ilyas, Program PIC.

One of the initiatives undertaken by the Pusu Indigenous Community, Sumbawa District, West Nusa Tenggara, is structuring an indigenous school with curriculum development. The role of indigenous women is very much considered so that they can contribute to the operation of the indigenous school and other collective efforts including learning traditional practices on the IPs’ collective land.

Another initiative in terms of revitalizing indigenous knowledge is carried out by the Kaum Datuk Rangkayo Endah Indigenous Community, Tanah Datar District, West Sumatra, which seeks to restore fading traditions and knowledge by establishing a learning hut as a center for indigenous and ecological education.

“Nowadays, our belief on ‘Anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan’, (child on my lap, nephews and nieces are guided, village people are supported) it is difficult to meet and rarely obtained. Many supporting factors have shifted. The shift in the function of Surau is one of them, where there are no more youth sleeping overnight in Surau and less interest of the youth in exploring Silek (martial art). The presence of the customary and ecological learning hut in Jorong Duo Koto brings back the spirit to recolor the shadowy and faded tradition. The spirit to rediscover the function of Surau, the spirit to rediscover the essence of ulayat, reflects various roles in the social system.” Riya Dharma, Program PIC.



BAGIAN III

Kisah Sukses

Pengetahuan-pengetahuan yang didokumentasikan sebagai hasil implementasi program dalam bentuk peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai proses dan perubahan yang didapatkan dari implementasi program. Terdapat beberapa kisah keberhasilan yang diimplementasikan oleh Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal, menunjukkan pengetahuan yang didapatkan, memahami perencanaan, implementasi, hingga hasil yang didapatkan berdasarkan arah yang jelas.

PASCA REDISTRIBUSI LAHAN, PERGERAKAN PETANI BANTEN BANGUN SEKOLAH RAKYAT

Semangat perjuangan petani untuk mengklaim hak komunalnya atas tanah di Desa Gunung Anten Kabupaten Lebak Provinsi Banten awalnya dilatarbelakangi oleh krisis agraria yang dirasakan masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial-ekonomi termasuk ketimpangan penguasaan tanah. Disaat yang sama, pada tahun 1985 terdapat lahan konsesi perkebunan karet seluas 1.100 hektar yang diberikan pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan ditelantarkan.

SECTION III

Success Stories

The knowledge documented from the program implementation covers the increased awareness and understanding of the process and changes obtained from program implementation. There are several success stories from Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities, showing the knowledge gained, the understanding about planning, implementation, and the result obtained based on clear directions.

POST-LAND REDISTRIBUTION, BANTEN PEASANTS' MOVEMENT BUILDS PEOPLE'S SCHOOL

The spirit of peasants' struggle to reclaim their communal rights to land in Gunung Anten Village, Lebak District, Banten Province, was initially motivated by the agrarian crisis facing the community who experienced socio-economic inequality including in land tenure. At the same time, in 1985 there was a 1.100 hectares rubber plantation concession in the form of a Cultivation Rights Title (HGU) granted by government, which was not utilized according to its purpose and later abandoned.

Hal ini mendorong petani untuk melakukan penggarapan tanah sesuai kearifan lokal dengan menanaminya berbagai tanaman pertanian seperti kopi, kelapa, duren, rambutan, petai, pisang dan kayu albasia. Namun dalam perjalanannya, penggarapan yang dilakukan oleh petani mengalami banyak tantangan. Mulai dari perusahaan yang memaksa petani untuk menebang tanaman karet yang ditanami dengan alasan perusahaan akan menjalankan program penanaman kembali di lahan terlantar, kriminalisasi para petani, intimidasi menggunakan jasa preman untuk merusak tanaman petani sampai pada pengusiran petani dari tanah garapannya.

Konflik agraria terus berlangsung hingga melahirkan gerakan perjuangan petani untuk melakukan reklamasi tanah yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menopang kehidupannya. Pada tahun 2010, petani mulai menyadari gerakan mereka yang belum terkoordinir dengan baik sehingga petani membangun serikat tani Pergerakan Petani Banten (P2B) untuk melahirkan gerakan kolektif dan lebih terorganisir yang bertujuan untuk mendesak penyelesaian konflik agraria dan pemenuhan hak dasar atas tanah.

Setelah perjuangan panjang selama 34 tahun, pada Oktober 2023 petani berhasil melakukan reklamasi melalui redistribusi tanah melalui program reforma agraria di lahan eks-HGU yang tidak diperpanjang kembali sejak tahun 2002. Petani kemudian mendapatkan 12 sertifikat tanah komunal seluas 127 hektar yang diberikan kepada 195 petani yang tergabung dalam P2B berada di lima desa, dua kecamatan. Dari total redistribusi tanah tersebut, sebanyak 65 bidang tanah atau 33% merupakan hak milik atas nama perempuan petani dan 25% lainnya dimiliki oleh petani muda yang berusia 35 tahun ke bawah.

Abay Haetami selaku Ketua P2B menyebutkan, "Kami merasa bersyukur, kami sudah berjuang puluhan tahun dan bisa menangkan redistribusi lahan. Kemenangan ini sebenarnya bukan pemberian pemerintah tetapi komitmen dari organisasi Pergerakan Petani Banten yang terus berjuang dan mendesak pemerintah untuk memberikan petani hak komunalnya atas tanah."

Kepemilikan lahan dengan sistem komunal atau bersama menjadi pilihan serikat untuk memastikan penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah di tangan petani agar dapat terjaga dan berkelanjutan. Skema komunal ini juga membuat masyarakat tidak bisa menjual sertifikat tanahnya secara sepihak tanpa persetujuan dari pemilik tanah lainnya.

Lebih lanjut, Abay menyampaikan, "Setelah redistribusi lahan maka P2B akan fokus untuk penguatan kapasitas anggota organisasinya melalui inisiatif pendirian Sekolah Rakyat. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman petani mengenai reforma agraria, pelatihan pembuatan bibit dan kompos, pengajian ibu-ibu, majelis taklim dan menjadi sekolah alternatif bagi anak-anak tingkat PAUD dan SD karena di sini jauh dari sekolah tetapi sekolahnya itu menginduk di sekolah formal yang ada."

This encourages peasants to cultivate the land according to local wisdom by planting various agricultural crops such as coffee, coconut, durian, rambutan, stink bean, banana and albasia wood trees. However, the cultivation carried out by the peasants experienced many challenges. Starting from the company forcing the peasants to cut down their rubber plants with the excuse that the company will carry out a replanting program on abandoned land, criminalization of peasants, intimidation using the services of thugs to damage farmers' plants, to the eviction of peasants from their cultivated land.

The agrarian conflict continued until it led to the peasants' resistance and movement to reclaim the land needed by the community to sustain their lives. In 2010, the peasants began to realize that their movement had not been well coordinated so that farmers built the Banten Peasants' Movement (P2B), a peasant union to create a collective and more organized movement aimed at urging the resolution of agrarian conflicts and the fulfillment of basic land rights.

After a long struggle for 34 years, in October 2023 farmers succeeded in reclaiming the former-HGU land, which had not been renewed since 2002, through land redistribution under the agrarian reform program. Peasants then received 12 communal land certificates covering an area of 127 hectares given to 195 peasants who are members of the union in five villages, two sub-districts. Of the total land redistribution, 65 plots of land or 33% are owned by peasant women and the other 25% are owned by young peasants under 35 years old.

Abay Haetami as Chairman of P2B said, "We feel grateful that we have fought for decades and won the land redistribution. This victory is not given by the government but the commitment of the Banten Peasants' Movement which continues to fight and urge the government to give peasants their communal rights to land."

Communal or shared land ownership is the union's choice to ensure that control, ownership and use of land are in the hands of and sustainably maintained by the peasants. This communal scheme also prevents people from unilaterally selling their land without the consent of other landowners.

Furthermore, Abay said, "After land redistribution, P2B union will focus on strengthening the capacity of its organization members through establishing a People's School. The goal is to increase peasants' understanding of agrarian reform, training on nursery and compost, women's recitation, *taklim* council and become an alternative school for children at the early childhood and elementary school levels because our village is far from the school and the school is attached to the existing formal school."

“Gagasan dan inisiatif pembangunan Sekolah Rakyat seakan gayung bersambut dengan adanya dukungan Nusantara Fund untuk mendukung pembangunannya. Kami merasa bersyukur dan berterima kasih, apa yang kami harapkan terwujud,” Jelas Bapak Abay.

Melalui dukungan Nusantara Fund, organisasi P2B berhasil mewujudkan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat yang dibangun diatas 2500 m² yang terletak di lokasi lahan kolektif hasil redistribusi lahan. Gedung ini kemudian dimanfaatkan untuk pembelajaran rutin bagi anak-anak sebanyak 16 orang terdiri dari; 6 orang siswa/siswi PAUD dan 10 orang siswa/siswi SD. Selain itu, Sekolah Rakyat juga dimanfaatkan sebagai Pendidikan rakyat seperti; pelatihan pengelolaan tanah, tata produksi, tata konsumsi sampai pemasaran, pengolahan pertanian, cara pembuatan pupuk dan cara penyambungan pucuk dengan melibatkan BPN dan Dinas Pertanian sebagai pembicara.

REMPANG TANAH TUMPAH DARAH

Hari itu, Rabu, 14 Agustus 2024, Ismail dan Riadi berkunjung ke Kantor Nusantara Fund. Kira-kira pukul 16.00 WIB. Mereka berdua adalah masyarakat Kampung Pasir Panjang, Rempang, Kepulauan Riau. Bersama dengan masyarakat Rempang yang lain, mereka menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Tiongkok hari itu. Nusantara Fund secara khusus mengundang mereka berdua untuk bertukar kisah tentang program pertanian yang mereka lakukan.

“Lahan kelompok Pasir Panjang [yang digunakan] dan itu kita bentuk ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara,” Kata Ismail menceritakan lahan yang dipakai oleh masyarakat Pasir Panjang untuk program pertanian yang didanai oleh Nusantara Fund.

Luas lahan pertanian yang mereka kelola kira-kira 2 hektar. Secara pengelolaan, masyarakat Pasir Panjang yang melaksanakannya. Namun, secara teknis, ada 6 orang yang bertanggung jawab untuk merawat tanaman di lahan itu.

Masyarakat Pasir Panjang mengelola lahan itu dengan cara campursari. Mereka menanaminya dengan cabai, kangkung, kemangi, dan pisang. Metode campursari dipilih karena cara itu dapat menjaga kesuburan tanah dari eksploitasi pertanian.

“Memang itu sudah jadi kehendak masyarakat. Kemudian kami juga berusaha menjaga kultur tanahnya. Takut umpamanya kalau kemangi terus-menerus [yang ditanam] dia [tanah] pada akhirnya akan kalah, *nih*. Makanya kita harus ganti lagi dengan tanaman lain,” Jelas Ismail.

Harga pasaran juga menjadi alasan pemilihan jenis tanaman yang dibudidayakan. Karena hasil usaha kolektif itu nantinya akan dimasukkan ke dalam kas komunitas. Hasil dari usaha kolektif itu diperuntukkan kegiatan-kegiatan komunitas, seperti membiayai keberangkatan Ismail dan Riadi ke Jakarta untuk aksi dan kegiatan komunitas lainnya. Pengurus komunitas yang bertanggung jawab

“The idea and initiative to build a People’s School was supported by Nusantara Fund for its construction. We feel grateful and thankful as what we hoped for was finally realized,” explained Abay.

Through the support of Nusantara Fund, the P2B union successfully built the People’s School on a 2.500 m² collective land obtained from the land redistribution program. This building is then used for regular learning of 16 children consisting of 6 early childhood education students and 10 elementary school students. In addition, the People’s School is used as people’s education center to conduct training on land management, production systems, consumption model and marketing, agricultural processing, fertilizer making, and grafting by involving National Land Agency (BPN) and the Agriculture Office as guest speakers.

REMPANG THE HOMELAND

On that day, Wednesday, August 14, 2024, Ismail and Riadi visited the Nusantara Fund Office. It was around 4.00 pm WIB. They are both residents of Pasir Panjang Village, Rempang, Riau Islands. Together with other Rempang residents, they held an action in front of the Chinese Embassy that day. Nusantara Fund invited them to share their stories about their agricultural program.

“The Pasir Panjang group’s land [was used] and we formed a structure comprising of a chairperson, a secretary, a treasurer,” Ismail said, describing the land used by the Pasir Panjang community for the agricultural program funded by Nusantara Fund.

The agricultural land they manage covers approximately 2 hectares and is under the management of the Pasir Panjang community. However, there are 6 people who are responsible for taking care of the plants in the field on regular basis.

The Pasir Panjang community manages the land by applying intercropping method. They planted it with chilies, kale, basil and bananas. The concern is that if we constantly plant basil, the soil will eventually lose its functions. The method was chosen because it can maintain soil fertility from agricultural exploitation.

“It is the will of the community. Then we also try to maintain the soil fertility at the same time. That’s why we must replace it with other plants,” Ismail explained.

The market price is also a reason for choosing the type of plants that are cultivated. Because the proceeds of the collective business will later be put into the community treasury. The proceeds from the collective business are earmarked for community activities, such as financing Ismail and Riadi’s trip to Jakarta for action and other community activities. The community administrators are responsible for financial

pada pengelolaan keuangan, sementara masyarakat Pasir Panjang sebagai anggota akan mengevaluasi laporan keuangan itu setiap akhir panen.

“Kemudian menyangkut pasaran, tidak selamanya itu kemangi juga punya harga. Ada titik-titik tertentu itu dia [kemangi] jatuh harga. Kalau *cabe* ini kan stabil harganya,” Tambahnya.

Upaya penanaman kolektif itu bermula dari konflik perebutan tanah masyarakat oleh perusahaan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Masyarakat menggunakan pendanaan Nusantara Fund untuk mulai bertani karena hasil laut mereka terancam. Menurut Riadi, peralihan dari nelayan ke petani tidak terlalu sulit karena mereka belajar dan bekerja secara gotong royong.

“Kalau kendala tentang pertanian ini memang ada sedikit tentang cuaca ya tapi kan di situ kita ada ahli-ahlinya juga. Yang kami kenal kayak kami angkat sebagai ketua. Ada juga tetangga kami memang aslinya berkebun. Di situ dia sering aktif untuk mengajar lah, untuk menjadi guru,” Terang Riadi.

Mempertahankan Ruang Hidup

Seperti dijelaskan oleh Manajer Pengorganisasian dan Akselerasi Wilayah Kelola Rakyat (WKR) WALHI Riau Eko Yunanda, pengajuan pengakuan WKR masyarakat Rempang harus melewati urusan administrasi yang berliku. Belum lagi soal ketiadaan dukungan pemerintahan tingkat bawah. Sementara itu, di tengah minimnya dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat Rempang membutuhkan kepastian atas legalitas tanah yang mereka tempati secepatnya. “Kalau mereka *tuh* kadang karena ini konflik jadi akhirnya skema apalah yang menurut mereka bisa cepat dan mereka bisa memiliki legalitas yang menurut mereka kuat dipegang,” Jelas Eko.

Alasan itu mudah dipahami menimbang bahwa di tanah itulah mereka lahir, tumbuh dewasa dengan orang-orang terdekat, dan membesarkan generasi yang terlahir dengan keringat mereka sendiri. Tumpukan kenangan itu tidak ternilai harganya bagi mereka dan tidak dapat ditukar dengan apapun, bahkan dengan uang kerohiman maupun permukiman baru.

Perasaan itulah yang mendorong generasi muda seperti Ratna untuk turun terlibat memperjuangkan tanah dan nasib orang-orang yang tinggal di sana. “Karena kan emang kita udah terlalu lama ya di situ. Pindah pun kita gak bisa juga *kebeli* memori di tempat yang baru. Terus juga udah terlalu banyak kisah-kisah lama di situ. Jadi pemerintah seharusnya *ngedenger* masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat.” Ungkapnya.

Namun, Ratna tidak mau dibilang bahwa upaya-upaya yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup dan hak-hak mereka ialah bentuk antipati terhadap investasi, pemerataan infrastruktur maupun ekonomi seperti klaim pemerintah. “Kami itu tidak anti investasi. Kami terima investasi selagi investasi itu tidak

management, while the Pasir Panjang community as members will evaluate the financial report at the end of each harvest.

“Regarding the market, basil does not always have a good price. There are certain points when the price of basil drops. Chili, on the other side, has a stable price,” he added.

The collective planting activity stems from the conflict over the seizure of community land by the company through the Rempang Eco City National Strategic Project (PSN). The community used Nusantara Fund support to start farming as their marine products were under threat. According to Riadi, the transition from fisherfolk to farmers is not too difficult as they learn and work in collectively.

“There are a few obstacles regarding agriculture, such as the weather, but we have got experts there too. The ones we know, we appoint as the chairperson. One of our neighbors is originally a farmer. In this instance, he often teaches us on how to, and become like our mentor,” Riadi explained.

Defending the Living Space

As explained by WALHI Riau Organizing and Acceleration Manager for People’s Management Area, Eko Yunanda, the Rempang community’s proposal for the recognition of their People’s Management Area had to go through a tortuous administrative process. Not to mention the lack of support from the lower levels of government. Despite the lack of support from the local government, the Rempang community needs immediate certainty over the legality of the land they occupy. “Sometimes, because this is a conflict, they come up with schemes they think can resolve this issue quickly and they can have legality they think they can hold on to,” Eko explained.

The reason is easy to understand considering that they were born on that land, grew up with the people closest to them, and raised a generation that was born with their own sweat. That pile of memories is priceless to them and cannot be exchanged for anything, not even for compensation money or new settlements.

It’s a feeling that drives young people like Ratna to get involved in fighting for the land and the fate of the people who live there. “Because we’ve been there for too long. Even if we move, we can’t buy the memory in the new place. Then there are too many old memories in this place. Therefore, the government must listen to the people, what the people want.” She spoke.

Ratna does not agree with the government’s claim that the community’s efforts to defend their living space and rights are an act of anti-investment, infrastructure and economic development. “We are not anti-investment. We accept investment provided that it does

merusak laut dan darat. Terus juga *enggak ngambil* hak kami, tanah kami. Biarlah masyarakat tinggal kayak pada dasarnya, di tempat masing-masing." Tambahnya.

Senada dengan suara Ratna, Ismail yang mewakili generasi yang lebih senior pun memilih tidak akan mundur demi mempertahankan tanah leluhurnya dari kepentingan investasi. Dia juga berharap bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Rempang dapat menginspirasi masyarakat wilayah lain yang memiliki nasib yang sama untuk memperjuangkan tanah mereka. "Bagi kawan-kawan dari luar sana, yang ada dari Papua sampai Aceh, mudah-mudahan tetap yakin bahwa tanah ini adalah tanah tumpah darah kita. Kita tidak mau digusur walau selangkah pun," Tegasnya.

MEMPERKUAT SOLIDITAS GERAKAN MASYARAKAT ADAT ORANG RIMBA UNTUK MENDAPATKAN HAK RUANG HIDUPNYA

Orang Rimba merupakan Masyarakat Adat marginal yang tinggal di dalam hutan dan tersebar di beberapa kabupaten Provinsi Jambi, salah satunya adalah Orang Rimba yang tinggal di Kabupaten Sarolangun. Penyebutan Rimba sendiri mengacu pada tempat tinggal komunitas masyarakat yang memilih berada di dalam hutan dataran rendah. Secara tradisional Orang Rimba menggantungkan hidup di sepanjang aliran sungai tersier dan bertahan hidup dengan cara berburu serta meramu berbagai sumber penghidupan dari hasil hutan. Orang Rimba biasanya tinggal dalam pondok-pondok sederhana dari material yang berada di hutan, kayu-kayu untuk tiang dan lantai, daun serdang untuk atap dan pengikatnya dengan menggunakan rotan.

Sayangnya, hutan tempat Orang Rimba menggantungkan penghidupan di tanah adat semakin sempit bahkan hilang yang disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit skala besar di bawah grup Sinarmas dan Astra Agro Lestari, program transmigrasi dan program Hutan Tanaman Industri (HTI). Setelah kehilangan ruang akses untuk penghidupan, situasi Orang Rimba benar-benar terpinggirkan dan memprihatinkan. Di bawah konsesi perusahaan, Orang Rimba membuat tenda-tenda sederhana dari plastik. Untuk bertahan hidup mereka berburu babi hutan dan mengumpulkan buah sawit yang jatuh untuk dijual. Beberapa dari Orang Rimba juga mengambil buah dalam bentuk tandan.

Kondisi tersebut, membuat perusahaan melihat dan memposisikan Orang Rimba sebagai pencuri atau kriminal sehingga setiap hari harus berhadapan dengan pihak keamanan perusahaan. Berbagai masalah lain pun muncul di lapangan, mulai dari sekadar cekcok dengan pihak keamanan perusahaan, pengusiran, pembakaran, pemenjaraan bahkan sampai adanya korban kekerasan dan korban jiwa. Hal ini membuat Orang Rimba yang terancam dan terusir mengakibatkan Orang Rimba harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain.

Di tempat baru, setelah beberapa minggu, Orang Rimba akan mengalami tekanan yang sama dan jika tekanan semakin tinggi

not degrade the sea and land. It must not violate our rights nor push us away from our land. Let people live like they have been living, in their own places." She added.

In line with Ratna's voice, Ismail, who represents the older generation, also chose not to back down in order to defend his ancestral land from investment interests. He also hopes that the struggle of the Rempang community will inspire others who share the same fate to fight for their land. "For our friends out there, from Papua to Aceh, hopefully they will remain convinced that this land is our homeland. We do not want to be evicted even for one step away," he said.

STRENGTHENING THE SOLIDITY OF ORANG RIMBA'S INDIGENOUS MOVEMENT TO RECLAIM THEIR RIGHTS TO LIVING SPACE

The Orang Rimba is marginalized Indigenous Peoples who live in the forest and are scattered in several districts of Jambi Province, one of which is Orang Rimba living in Sarolangun District. The term Rimba itself refers to the place where the community chooses to live i.e. in the lowland forest. Traditionally, the Orang Rimba live along tertiary river flows and survive by hunting and gathering various forest products as their source of livelihood. The Orang Rimba usually live in simple huts made from materials found in the forest, wood for poles and floors, *serdang* leaves for roofing and rattan to for binding.

Unfortunately, the forests on which Orang Rimba depend for their livelihoodsonindigenoulandaregettingssmallerandevendisappearing due to land conversion for large-scale oil palm plantations under the Sinarmas and Astra Agro Lestari groups, transmigration programs and Industrial Plantation Forest (HTI) programs. After losing access to space for livelihoods, the Orang Rimba are truly marginalized and in dire straits. Under company concessions, the Orang Rimba make simple plastic tents. To survive they hunt wild boar and collect fallen palm fruits to sell. Some of the Orang Rimba also collect fruit in bunches.

This condition makes the company consider and position Orang Rimba as thieves or criminals so that every day they would have to deal with company security. Other problems also emerged in the field, ranging from mere quarrels with company security officers, eviction, arson, imprisonment and even victims of violence and casualty. This has threatened and displaced the Orang Rimba, causing them to move from one location to another.

In the new place, the Orang Rimba will experience the same pressure even after a few weeks and when the pressure gets stronger, new

maka akan muncul konflik baru dan akhirnya Orang Rimba akan memutuskan untuk berpindah ke tempat baru lagi. Hal ini menjadi suatu siklus dan terus berlanjut pada kehidupan Orang Rimba di Provinsi Jambi. Dalam jangka panjang, hal ini kemudian membuat Orang Rimba kehilangan sumber daya penghidupan, tempat ritual, kepercayaan dan kehilangan identitas.

Konflik dengan perusahaan telah berlangsung lama dan terus berulang. Hal ini kemudian menumbuhkan kesadaran bagi Orang Rimba untuk mulai memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak ruang hidup mereka dari ekspansi perusahaan. Dalam prosesnya, Orang Rimba telah melakukan perjuangan dengan didampingi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi untuk memperjuangkan hak-hak mereka di kawasan konsesi perusahaan hingga ke kantor pusat perusahaan, dengan melibatkan Komnas HAM, Kementerian ATR, BPB dan Pemerintah Daerah. Namun hingga saat ini belum mendapatkan hasil yang baik. Perbaikan yang dilakukan hanya sebatas pemberian sembako melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan.

Pendidikan Kritis dan Kebangkitan Kesadaran Orang Rimba

Kebangkitan kesadaran Masyarakat Adat Orang Rimba semakin kuat setelah kegiatan pendidikan kritis yang dilaksanakan oleh Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bunga Kembang dengan dampingan KKI Warsi dan dukungan Nusantara Fund. Pendidikan kritis ini berfokus pada hak asasi, lingkungan hidup, dan hak ruang hidup. Kegiatan ini berhasil membentuk kader-kader kritis Orang Rimba dari kelompok orang muda, perempuan, dan tokoh masyarakat. Terdapat 60 orang perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan ini.

Kader-kader yang telah dilatih tersebut pada akhirnya lebih menyadari dan memahami mengenai pentingnya merebut, menjaga, melindungi ruang hidup dan wilayah adatnya. Kegiatan pendidikan kritis ini juga mampu membangun komitmen internal yang kuat bagi Orang Rimba untuk mengadvokasi dan menyuarakan kepentingan mereka di berbagai forum serta mampu melindungi wilayah adat dan hak-hak ruang hidup mereka dari ekspansi perusahaan sawit berskala besar.

Dampak lainnya adalah sekitar 1.300 orang Masyarakat Adat Orang Rimba yang tinggal di perkebunan sawit telah memiliki persatuan dan soliditas antar kelompok yang tinggi sebagai dampak dari kesadaran kritis kolektif yang tertindas selama bertahun-tahun oleh perusahaan. Selain itu, dari kelompok perempuan Orang Rimba, lebih menyadari akan pentingnya menjaga wilayah adat sebagai bagian dari identitas, keberlanjutan budaya dan bagian dari upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Kelompok perempuan juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran hutan dalam menyerap karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem lokal.

conflicts will arise and finally the Orang Rimba will decide to move to another new place. This becomes a cycle and continues to happen in the lives of the Orang Rimba in Jambi Province. In the long run, this will make the Orang Rimba completely lose their sources of livelihood, ritual site, beliefs and identity.

The conflict with the companies has been going on for a long time and keeps recurring. It then raised the awareness for the Orang Rimba to start fighting for and defending their rights to their living space from the company's expansion. In their struggle, the Orang Rimba have been assisted by the Indonesian Conservation Community (KKI) Warsi to fight for their rights in the company's concession area. Besides, they went to the company's headquarters to protest by involving the Indonesian Commission for Human Rights (Komnas HAM), the Ministry of Agrarian and Spatial Planning, BPB and the local government. However, until now there has not been a good result. The improvements made are only limited to providing basic necessities through the company's Corporate Social Responsibility (CSR) fund.

Critical Education and the Raising Awareness of Orang Rimba

The awareness of Orang Rimba Indigenous Peoples is getting stronger after critical education activities carried out by the Community Learning Center (PKBM) with the assistance of KKI Warsi and the support of Nusantara Fund. This critical education focuses on human rights, the environment, and the rights to living space. This activity succeeded in producing critical cadres of Orang Rimba from groups of young people, women, and community leaders. There were 60 women actively involved in this activity.

The cadres who have been trained are finally more aware of and increasingly understand the importance of reclaiming, maintaining, and protecting their living space and indigenous territory. This critical education is also able to build a strong internal commitment for the Orang Rimba to advocate and voice their interests in various forums and to protect their rights to their indigenous territories and living space from the expansion of palm oil company.

Another impact is strong unity and solidity between groups of 1,300 Orang Rimba indigenous peoples who live in oil palm plantations. It because of their collective critical thinking has been oppressed for years by the company. In addition, the women of Orang Rimba are now more aware of the importance of maintaining indigenous territories as part of their identity, cultural sustainability, and efforts to reduce the impact of climate change. The women's group also has a deep understanding on the role of forests in sequestering carbon and maintaining the balance of the local ecosystem.

Hal tersebut, sesuai pernyataan Jauharul Maknun anggota KKI Warsi sebagai pendamping Masyarakat Adat Orang Rimba yang menyebutkan;

“Sebelumnya, banyak anggota komunitas merasa terpinggirkan dan tidak tahu cara memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, program pendidikan kritis yang diperkenalkan membawa angin segar. Diskusi mengenai hak asasi manusia, hukum lingkungan, dan strategi advokasi mulai membuka mata mereka terhadap hak-hak yang selama ini mereka miliki namun tidak disadari. Dengan materi pendidikan yang disesuaikan dengan konteks lokal, Orang Rimba mulai memahami pentingnya hak ruang hidup dan keberlanjutan wilayah adat mereka. Pengetahuan ini memberikan mereka keberanian untuk berbicara di hadapan publik serta otoritas pemerintah dan perusahaan.”

Lebih lanjut, pendidikan kritis telah membangkitkan keberanian Masyarakat Adat Orang Rimba secara kolektif untuk mengorganisir dari berbagai komunitas untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka yang pada akhirnya suara dan aspirasi Orang Rimba mulai didengar oleh perusahaan sawit dan pemerintah dengan membuka dialog.

“Komunitas mulai mengorganisir diri dan membentuk kelompok advokasi yang mewakili berbagai bagian komunitas. Mereka mulai aktif menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam berbagai forum, baik dengan perusahaan sawit maupun pemerintah daerah. Usaha ini mulai membuahkan hasil. Suara mereka mulai didengar dan beberapa perusahaan sawit yang sebelumnya tidak mengindahkan keberadaan mereka kini mulai membuka dialog.” Ujar Jauharul.

Lebih luas, kesadaran kolektif ini membawa perubahan dengan menginspirasi banyak Masyarakat Adat lain yang menghadapi situasi serupa. Pendidikan kritis dan advokasi terhadap Orang Rimba telah membuktikan bahwa pengetahuan dan keberanian dapat menjadi kunci untuk meningkatkan perlindungan yang lebih baik terhadap wilayah adat dan kehidupan sosial mereka. Orang Rimba bisa lebih fokus pada kegiatan tradisional seperti berburu dan bercocok tanam tanpa khawatir kehilangan tanah. Pendidikan yang mereka terima juga membuka jalan bagi generasi muda untuk lebih terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan berkelanjutan.

PENGUATAN GERAKAN MASYARAKAT ADAT PATTIRO TOA SINJAI UNTUK MENDAPATKAN PENGAKUAN WILAYAH ADATNYA

Masyarakat Adat Pattiro Toa merupakan komunitas masyarakat yang berada di Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dengan wilayah adatnya seluas 1.125,5 hektar yang dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan. Sebelum ada dominasi penguasaan lahan oleh pemerintah, Masyarakat Adat Pattiro Toa hidup damai, bebas dari teror dan ancaman perampasan wilayah adat. Namun, semuanya berubah saat pemerintah mulai menguasai dan mengubah seluruh wilayah adat menjadi kawasan hutan negara yang difungsikan

It is in accordance with the statement of Jauharul Maknun, a member of KKI Warsi who has been assisting the Orang Rimba Indigenous Peoples, as follows:

“Previously, many community members felt marginalized and did not know how to fight for their rights. However, the critical education program that was introduced brought a fresh air. Discussions on human rights, environmental law, and advocacy strategies opened their eyes to the rights they have always had but were unaware of. With educational materials tailored to the local context, the Orang Rimba began to understand the importance of the rights to living space and the sustainability of their indigenous territories. This knowledge gave them the courage to speak out to the public as well as government authorities and corporate.”

Furthermore, critical education has boosted the courage of the Orang Rimba collectively to organize various communities to protect and fight for their rights. As a result, the voices and aspirations of the Orang Rimba have begun to be heard by palm oil companies and the government by opening dialogues.

“Community members began to organize themselves and form advocacy groups representing different parts of the community. They began to actively voice their interests and needs in various forums, both with palm oil companies and local governments. These efforts began to gain result. Their voices began to be heard and some palm oil companies that had previously ignored their existence now began to open dialogues.” Said Jauharul.

In a wider sense, this collective awareness brought about change by inspiring many other Indigenous Peoples facing similar situations. Critical education and advocacy for the Orang Rimba has proven that knowledge and courage are key to promoting better protection of their territories and social lives. Orang Rimba can focus more on traditional activities such as hunting and farming without worrying about losing their land. The education they receive also paves the way for the younger generation to be more involved in various sustainable development activities.

STRENGTHENING THE PATTIRO TOA SINJAI'S INDIGENOUS MOVEMENT TO OBTAIN RECOGNITION OF ITS INDIGENOUS TERRITORY

Pattiro Toa is an indigenous community located in Terasa Village, West Sinjai Sub-district, Sinjai District with a customary land covering 1,125.5 hectares utilized as a source of livelihood. Before the government's domination of land control, the Pattiro Toa Indigenous Community lived in peace, free from terror and threats of customary land grabbing. However, thing changed when the government began to control and

sebagai hutan produksi. Hal ini terlihat pada Masyarakat Adat Pattiro Toa di tiga kampung yaitu Cenre, Pattiro dan Kasimpurang yang baru menyadari tidak lagi memiliki akses bebas di wilayah adatnya termasuk hutan adat.

Kondisi tersebut menyebabkan konflik karena adanya ketimpangan dalam penguasaan sumber daya penghidupan bagi Masyarakat Adat, lemahnya peran kelembagaan adat dalam mengelola wilayah adatnya dan hilangnya kepercayaan orang muda dalam mengelola komunitas masyarakat adatnya. Disisi lain, pemerintah terus menekan Masyarakat Adat agar terus menjaga hutan, air dan sungai di wilayah adatnya. Sementara itu, dari segi pengakuan wilayah adat, pemerintah juga belum mengakui sepenuhnya eksistensi Masyarakat Adat dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak-hak pengakuan wilayah adatnya. Pengakuan terhadap wilayah adat dan penetapan hutan adat seharusnya menjadi tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan oleh Negara.

Hal ini kemudian membangun kesadaran bagi Masyarakat Adat yang didampingi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Sinjai untuk melakukan suatu gerakan dalam mengadvokasikan seluruh kepentingannya kepada pemerintah. Pada tahun 2019, Masyarakat Adat berhasil menerima pengakuan wilayah adatnya yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat. Peraturan ini menjadi payung hukum bagi Masyarakat Adat untuk melanjutkan upaya identifikasi, verifikasi, dan validasi masyarakat hukum adat. Tahun 2021, Pemerintah juga membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat yang diperbarui setiap tahun dan memasukkan kegiatan tersebut dalam Rencana Strategis Kabupaten Sinjai 2024-2026.

Selanjutnya melalui dukungan Nusantara Fund, Masyarakat Adat Pattiro Toa dengan dampingan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Sinjai kembali memperkuat konsolidasi gerakannya untuk mendapatkan akses legal pengelolaan wilayah adat dan Hutan Adatnya melalui penyiapan data sosial dan spasialnya. Dampaknya, Masyarakat Adat Pattiro Toa berhasil melakukan pemetaan wilayah adatnya seluas 1.178,8 hektar. Selain itu, Masyarakat Adat juga berhasil menyusun dokumen identifikasi sejarah, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan adat dan harta kekayaan adat yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun.

Hal tersebut, sesuai pernyataan Jauharul Maknun anggota KKI Warsi sebagai pendamping Masyarakat Adat Orang Rimba yang menyebutkan;

“Melalui pemetaan partisipatif juga berdampak terhadap pengetahuan Masyarakat Adat akan luas wilayah adat mereka serta dapat mengetahui adanya tumpang tindih klaim antara hutan adat dengan hutan negara. Olehnya itu, melalui dukungan ini juga memberikan dampak terhadap upaya pengembalian hak Masyarakat Adat terhadap hutan adat yang selama ini dikelola secara turun-temurun”.

convert all customary land into designated state production forests. This is the case for Pattiro Toa Indigenous Peoples in three villages, namely Cenre, Pattiro, and Kasimpurang, who just realized that they no longer have free access to their customary land or territory, including their customary forests.

The situation has caused conflicts due to inequality in the control of livelihood resources that are important for IPs, the weak role of indigenous institutions in managing their customary land and territory as well as the loss of confidence of youth in managing their community. On the other hand, the government continues to put pressure on Indigenous Peoples to continue to protect forests, water and rivers in their indigenous territory. Meanwhile, the government has yet to fully recognize the existence of Indigenous Peoples and yet to fulfil its obligation to do so. Recognition of indigenous territory and the establishment of customary forests is the responsibility of the State.

The pressing issue has raised awareness among Indigenous Peoples, who are assisted by the AMAN Sinjai Local Chapter. Together they created a movement to advocate for their interests to the government. In 2019, Indigenous Peoples successfully obtained recognition of their indigenous territories, marked by the enactment of Local Government Regulation Number 1 of 2019 concerning Guidelines for the Recognition, Protection and Empowerment of Indigenous Peoples. This regulation serves as a legal umbrella for Indigenous Peoples to continue encourage the identification, verification, and validation of IPs. In 2021, the Government also established an Indigenous Peoples Committee that is updated annually and included the activities in the Sinjai District Strategic Plan 2024-2026.

Furthermore, with the support of the Nusantara Fund, the Pattiro Toa Indigenous Community with the assistance of AMAN Sinjai Local Chapter, re-strengthened the consolidation of its movement to gain legal access to the management of its indigenous territory and customary forest. This step was done through the preparation of social and spatial data. As a result, the Pattiro Toa Indigenous Community successfully mapped its indigenous territory covering an area of 1,178.8 hectares. Besides, the community compiled documents identifying history, indigenous territory, customary laws, indigenous institutions and customary assets that are critical knowledge to pass on from generation to generation.

It is in line with the statement of Jauharul Maknun, a member of KKI Warsi who has been assisting the Orang Rimba Indigenous Peoples, as follows:

“Participatory mapping also impacts Indigenous Peoples’ knowledge about the extent of their indigenous territories and can identify overlapping claims between customary forest and state forests. Therefore, this support has an impact on efforts to restore Indigenous Peoples’ rights to customary forest that have been managed for generations”.

Secara bersama-sama, Masyarakat Adat Pattiro Toa menyusun dokumen permohonan penetapan hutan adat sebanyak 835,7 hektar.

Dalam proses implementasi program ini, AMAN Daerah Sinjai bersama dengan Komunitas Masyarakat Adat Pattiro Toa juga melibatkan Komunitas Masyarakat Adat Kampala. Hal itu dilihat pada Proses Focus Group Discussion (FGD) penyerahan Dokumen untuk Identifikasi Masyarakat Adat Pattiro Toa ke Panitia Masyarakat Adat juga melibatkan Komunitas Masyarakat Adat Kampala menyampaikan dokumen identifikasi Masyarakat Adat Kampala dengan luas wilayah adat sebanyak 1.106,6 hektar. Proses pelibatan Masyarakat Adat Kampala juga berlangsung hingga pada kegiatan Rapat Pembahasan Hasil Identifikasi, Verifikasi untuk Validasi Masyarakat Adat Pattiro Toa dengan Panitia Masyarakat Adat dan bahkan juga melibatkan Masyarakat Adat Barambang Katute untuk pembahasan hasil verifikasinya.

Proses implementasi program Nusantara Fund ini, bukan hanya berdampak pada Komunitas Masyarakat Adat Pattiro Toa, tapi juga berdampak pada pelibatan Komunitas Masyarakat Adat Kampala dan Barambang Katute. Selain itu, proses ini juga membantu Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dalam mendorong percepatan pengakuan Masyarakat Adat dengan ketersediaan dokumen identifikasi Masyarakat Adat.

Together, the Pattiro Toa Indigenous Community compiled documents for request to recognize its customary forest covering a total of 835.7 hectares.

In the process of implementing this program, AMAN Sinjai Local Chapter and the Pattiro Toa Indigenous Community engaged the Kampala Indigenous Community. This can be seen in the Focus Group Discussion (FGD) process of submitting documents for the identification of Pattiro Toa Indigenous Peoples to the Indigenous Peoples Committee, which also involved the Kampala Indigenous Community. Together they submitted identification documents for Kampala Indigenous Peoples with 1,106.6 hectares indigenous territory. The process of involving the Kampala Indigenous Community continued to the Meeting with the Indigenous Peoples Committee to discuss the Results of Identification, Verification to Validation of the Pattiro Toa Indigenous Community. It even involved the Barambang Katute Indigenous Community to discuss the results of the verification.

Thus the implementation of Nusantara fund supported program not only impacts the Pattiro Toa Indigenous Community, but also the Kampala and the Barambang Katute Indigenous Communities. In addition, with the availability of Indigenous Peoples identification documents, this process has assisted the Village, Sub-district and District Governments in encouraging the acceleration of Indigenous Peoples recognition.



BAGIAN IV

Dukungan Pendanaan

Dalam usia yang masih sangat muda yaitu 1 tahun 7 bulan, Nusantara Fund didirikan dan memberikan pendanaan langsung bagi Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal, Nusantara Fund telah mengimajinasikan pendanaan langsung sebagai *journey of Respect*. Mekanisme Pendanaan Langsung di Nusantara Fund menganut nilai *Respond by Respect* artinya memudahkan komunitas terkait apapun kesulitannya akan dibantu dan didampingi semaksimal mungkin dan menaruh kepercayaan yang kuat mendukung pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal yang sedang diperjuangkan yang terkait dengan pencapaian 5 target utama Nusantara Fund.

Hingga akhir tahun 2024, Nusantara Fund telah menerima dukungan komitmen pendanaan dari lembaga donor dan filantropi sebesar USD 8.550.000 yang bersumber dari 5 organisasi meliputi;

1. **Climate and Land Use Alliance (CLUA)**; memberikan dukungan pendanaan sebesar USD 250,000 untuk memperkuat kelembagaan dan manajemen Nusantara Fund. Periode kontrak dukungan pendanaan adalah Agustus 2023 hingga Juli 2024.
2. **The David and Lucile Packard Foundation**; memberikan dukungan pendanaan sebesar USD 300,000 untuk pendanaan langsung

SECTION IV

Funding Support

At a very young age of 1 year and 7 months, Nusantara Fund has already provided direct funding for Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities. Nusantara Fund envisions direct funding as a journey of respect. The Direct Funding Mechanism at Nusantara Fund adheres to the value of Respond by Respect, meaning that it facilitates the relevant communities. Regardless the difficulties the community encounters, they will be accompanied and assisted as much as possible. Furthermore, Nusantara Fund puts a strong trust in supporting the fulfillment of the rights of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities while they are fighting for the achievement of the 5 main targets of Nusantara Fund.

By the end of 2024, Nusantara Fund has received funding commitment support from donor and philanthropic institutions amounting to USD 8,550,000 sourced from 5 organizations including;

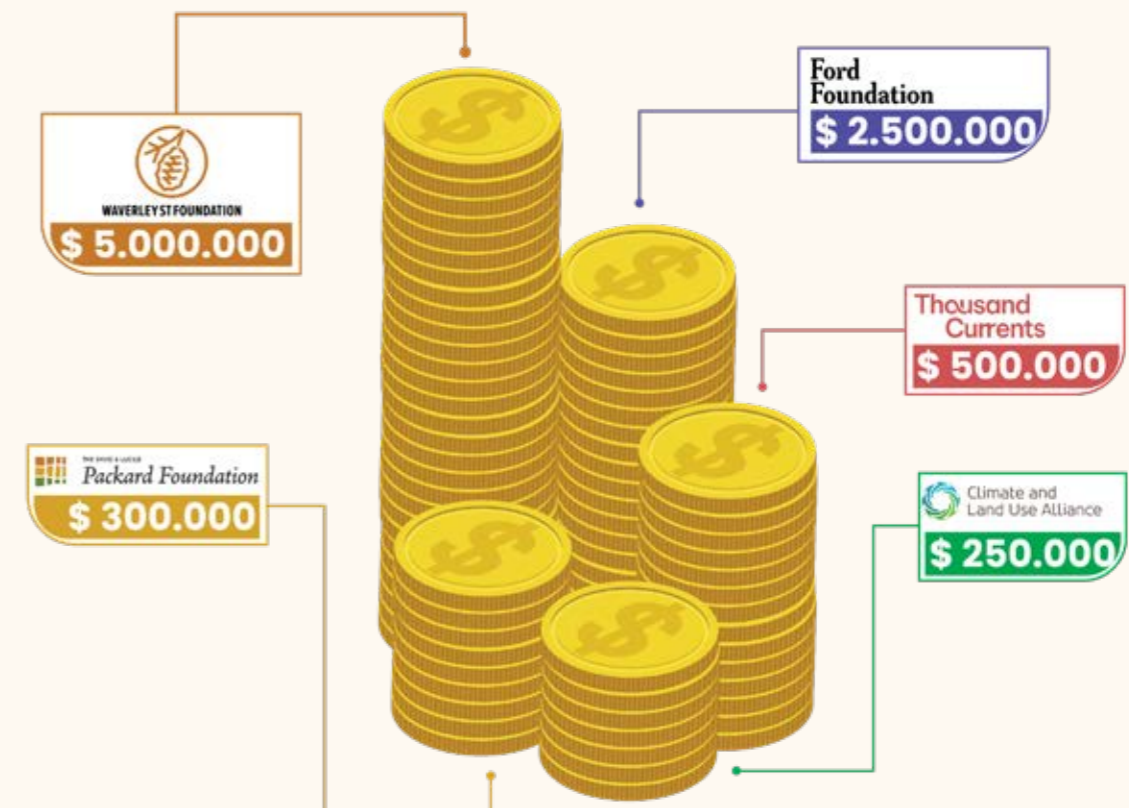
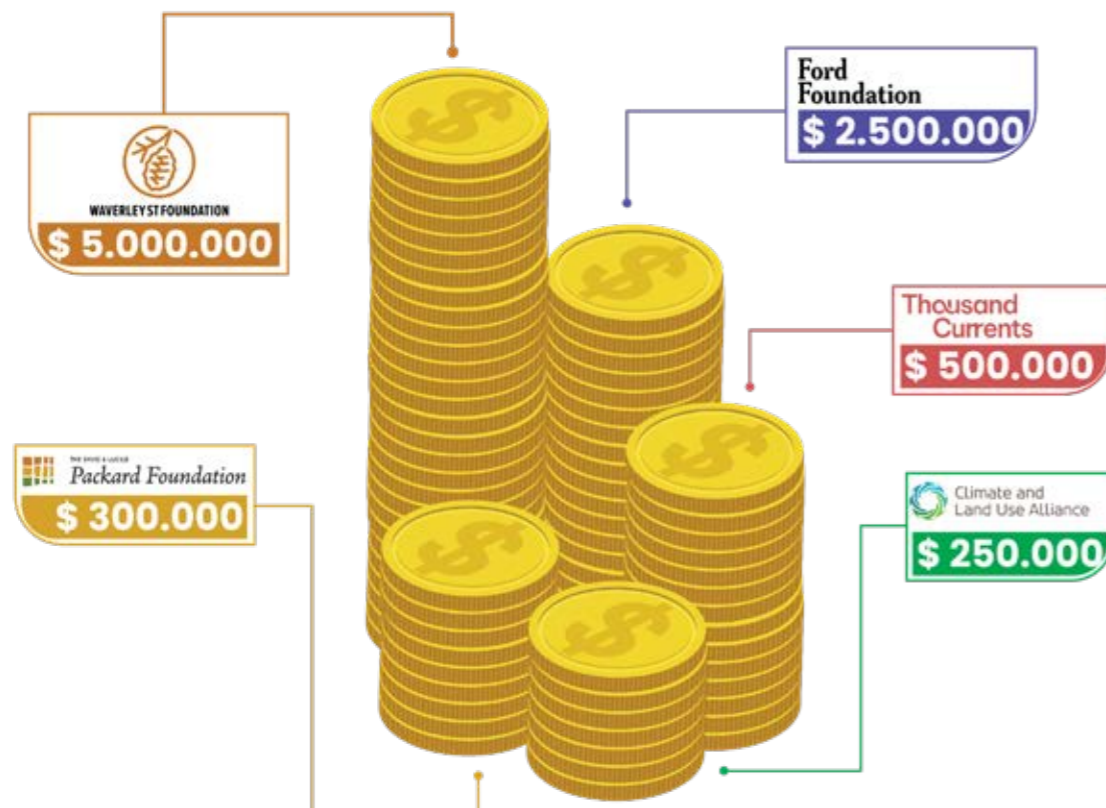
1. **Climate and Land Use Alliance (CLUA)**; provides funding support of USD 250,000 to strengthen the institutional and management of the Nusantara Fund. The funding support contract period is August 2023 to July 2024.
2. **The David and Lucile Packard Foundation**; provides funding support of USD 300,000 for direct funding (re-granting) that supports

(re-granting) yang mendukung inisiatif kelompok-kelompok Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, Komunitas Lokal. Periode kontrak dukungan pendanaan adalah September 2023 hingga Agustus 2024. The David and Lucile Packard Foundation juga telah berkomitmen untuk melanjutkan dukungan pendanaannya yang akan dimulai pada awal tahun 2025.

3. **Thousand Currents**; memberikan dukungan pendanaan sebesar USD 250,000 untuk pendanaan langsung (*re-granting*) yang mendukung inisiatif kelompok-kelompok Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, Komunitas Lokal pada periode kontrak Juli 2023 hingga Juli 2024. Dukungan pendanaan untuk tahun kedua periode Juli 2024 hingga Juli 2025 sebesar USD 250,000 adalah dukungan untuk memperkuat kelembagaan dan manajemen Nusantara Fund.
4. **Ford Foundation**; memberikan dukungan pendanaan sebesar USD 2,500,000 untuk periode kontrak selama 3 tahun, dimulai pada Januari 2024 hingga Desember 2026. Alokasi masing-masing untuk dukungan tersebut antara lain, pendanaan langsung (*re-granting*) sebesar USD 1,000,000, dukungan inti (*core support*) sebesar USD 500,000, dan peruntukkan dana abadi (*endowment fund*) sebesar USD 1,000,000.
5. **Waverley St Foundation**; memberikan dukungan pendanaan sebesar USD 5,000,000 untuk periode selama 5 tahun, dimulai pada September 2024 hingga September 2029. Dukungan diberikan setiap tahunnya sebesar USD 1,000,000 untuk mendukung inisiatif kelompok-kelompok Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, Komunitas Lokal dan juga untuk memperkuat kelembagaan dan manajemen Nusantara Fund.

initiatives of Indigenous Peoples, People’s Organizations, Local Communities. The funding support contract period is September 2023 to August 2024. The David and Lucile Packard Foundation has also committed to continuing its funding support which will begin in early 2025.

3. **Thousand Currents**; provides funding support of USD 250,000 for direct funding (*re-granting*) that supports the initiatives of Indigenous Peoples, People’s Organizations, Local Communities groups in the contract period July 2023 to July 2024. Funding support for the second year of the period July 2024 to July 2025 of USD 250,000 is support to strengthen the institution and management of the Nusantara Fund.
4. **Ford Foundation**; provides funding support of USD 2,500,000 for a contract period of 3 years, starting in January 2024 to December 2026. The allocations for each of these supports include direct funding (*re-granting*) of USD 1,000,000, core support of USD 500,000, and endowment fund allocation of USD 1,000,000.
5. **Waverley St Foundation**; provide funding support of USD 5,000,000 for a period of 5 years, starting in September 2024 to September 2029. Support is provided annually in the amount of USD 1,000,000 to support the initiatives of Indigenous Peoples groups, People’s Organizations, Local Communities and also to strengthen the institutions and management of the Nusantara Fund.



Kita mengajak lembaga donor dan filantropi untuk terlibat dalam proses transformasi melampaui praktik pemberian dana tradisional artinya relasi berbasis kepercayaan, pendanaan yang lebih berbasis aktor Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal bukan tematik sifatnya, dan mengamplifikasi kepemimpinan di organisasi lokal, juga keberlangsungan dan resiliensi pendanaan langsung yang dikelola Nusantara Fund. Implikasinya, lembaga donor dan filantropi yang menjadi pendukung kami memberikan kepercayaan dalam bentuk *general support* untuk pendanaan langsung, operasional, juga dalam bentuk *endowment fund*. Hal ini mempermudah bagaimana Nusantara Fund mengelola, baik untuk pendanaan langsung komunitas maupun bagaimana strategi *endowment fund* untuk resiliensi keuangan dan keberlanjutan pendanaan langsung ini. Berbagai tematik program kami integrasikan dalam 5 target utama Nusantara Fund sehingga tetap dapat selaras dengan inisiatif di tingkat komunitas. Sejauh ini pelaporan yang telah dilakukan kepada Lembaga Pemberi Dana di Nusantara Fund sangat mudah namun tetap menjunjung tinggi prinsip berbasis bukti dan akuntabilitas. Kami juga secara rutin mengupdate perkembangan dari program pendanaan langsung dan terlibat dalam pertemuan bersama lembaga donor filantropi pendukung kami. Tahun ini kami telah mempersiapkan kelola pengetahuan dan perbaikan database pendanaan langsung yang dapat memastikan publikasi dari kerja-kerja komunitas di media sosial dan website kami. Ke depan kami juga akan meningkatkan layanan pendanaan langsung untuk proses peningkatan kapasitas di komunitas.

Kami mengundang lembaga donor dan filantropi dan seluruh pendukung mekanisme pendanaan langsung komunitas untuk terus bersama kami membangun keberlanjutan pendanaan langsung bagi Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal, dan memperkuat Respect untuk mendorong solusi krisis iklim.

LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2024, Nusantara Fund telah mengalokasikan dan mendistribusikan pendanaan untuk mendukung inisiatif program Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal sebesar Rp22.417.977.699,- dalam tiga siklus. Pendanaan ini disalurkan kepada mitra utama melalui skema internal sebesar Rp19.136.524.499,- dan mitra solidaritas sebesar Rp3.281.453.200,-. Kami juga telah mengelola Endowment Fund di tahun 2024 sebesar 1.000.000 USD dan berharap ke depan semakin meningkat jumlahnya sebagai salah satu solusi kemandirian pendanaan di masa mendatang. Kami juga mengalokasikan Emergency Fund sebesar 3% dari total general support tahun 2024 yaitu Rp. 121.860.000,- yang dikelola oleh Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA). Dukungan operasional manajemen Nusantara Fund, sejak Agustus 2023 hingga Desember 2024 diperkirakan telah menggunakan anggaran sebesar 375,000 USD atau sekitar 5,8 miliar rupiah dalam rangka mengimplementasikan mekanisme pendanaan langsung.

Dalam pengelolaan keuangan tersebut, Nusantara Fund telah berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen yang sederhana,

We invite donor and philanthropic institutions to engage in transformative process beyond traditional granting practices, meaning that the funding is trust-based, more actor-based—Indigenous Peoples, People’s Organizations, and Local Communities—rather than thematic in nature, and amplifying leadership in local organizations, as well as the sustainability and resilience of direct funding managed by Nusantara Fund. The donor and philanthropic institutions that support us provide trust in the form of general support for direct funding, operations, and endowment funds. This facilitates Nusantara Fund in managing both the direct funding for communities and the endowment fund strategy for financial resilience and sustainability of this direct funding mechanism. We integrated various thematic programs into the 5 main targets of Nusantara Fund so that they can still be aligned with initiatives at the community level. So far, the reporting that has been done to the donors was simple but still upholds the evidence-based principle and accountability. We regularly update our supporting donor and philanthropic institutions on the progress of the direct funding program and engage in meetings with them. This year we started to prepare a knowledge management and direct funding database that will ensure the publication of community works on our social media and website. Going forward, we will also improve our direct funding services for capacity building processes in the community.

We invite donor and philanthropic institutions and all supporters of direct funding for communities to join us in building the sustainability of direct funding for Indigenous Peoples, People’s Organizations, and Local Communities, and increasing Respect to drive solutions to the climate crisis.

FINANCIAL REPORT

In 2024, Nusantara Fund has allocated and distributed financial support amounting to IDR 22,417,977,699 in three cycles to support Indigenous Peoples, People’s Organizations and Local Communities initiatives. The fund mechanism has distributed Rp19,136,524,499 to main partners through internal schemes and Rp3,281,453,200 to solidarity partners. We have also managed an Endowment Fund in 2024 of 1,000,000 USD and hope that in the future the amount will increase as one of the solutions for future funding independence. We also allocate an Emergency Fund of 3% of the total general support in 2024, which is IDR 121,860,000.- which is managed by the National Agrarian Reform Committee (KNPA). Operational support for the Nusantara Fund management, from August 2023 to December 2024, is estimated to have used a budget of 375,000 USD or around 5.8 billion rupiah in order to implement a direct funding mechanism.

In managing the fund, Nusantara Fund has committed to implementing a simple, flexible and accountable management system. Simple

fleksibel, dan akuntabel. Sederhana maksudnya adalah Nusantara Fund memberikan keleluasan pada komunitas masyarakat yang didanai untuk merencanakan dan melaporkan seluruh penggunaan dana dalam bentuk apapun yang tidak menyulitkan komunitas pengelola program. Sementara fleksibel maksudnya adalah setiap komunitas masyarakat yang didukung, memiliki kelenturan atau kebebasan untuk menyesuaikan atau melakukan perubahan postur dana selama perubahan yang dilakukan sesuai kesepakatan tim pelaksana program dan pendamping, tidak mengakibatkan penambahan alokasi dana dan memudahkan capaian target program.

Dari sisi akuntabilitas, maksudnya seluruh pengelolaan dana baik sumber pendanaan maupun pendistribusian dana dikelola dengan mengutamakan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan. Selain itu, komunitas masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangan program sesuai kegiatan dan peruntukannya. Akuntabilitas juga dimaknai dengan melakukan audit laporan keuangan tahunan Nusantara Fund dan penyampaian informasi keuangan secara berkala yang diupload di website dan bisa diakses oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Nusantara Fund.

Pada pengelolaan program dan keuangan di tingkat tapak, Nusantara Fund sangat terbantu dengan peran penting organisasi pendamping komunitas masyarakat dari AMAN, KPA, dan WALHI. Nusantara Fund juga menerapkan pendekatan yang mengutamakan pendekatan komunikasi aktif sesering mungkin dalam memberikan bantuan teknis administrasi dan keuangan kepada Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal selama proses implementasi program.

means that Nusantara Fund provides flexibility to the supported communities to plan and report the entire use of fund in any form they think appropriate and does not complicate them further. While flexible means that each supported community has the flexibility or freedom to adjust or make changes to the use of fund, provided that the changes are in accordance with the agreement between the implementing team and program assistant, no additional funding involved and facilitate the achievement of program targets.

In terms of accountability, this means that the entire management both the fund and its distribution, is managed by prioritizing the application of transparent financial management principles. In addition, the community has the obligation to submit financial report according to its activities and allocation. Accountability is also interpreted as auditing Nusantara Fund's annual financial statement and uploading periodic financial information on the website and make them accessible to the public. It is a form of accountability for Nusantara Fund's financial management.

In program and financial management at the grassroots or site level, Nusantara Fund is greatly assisted by the important role of supporting organizations such as AMAN, KPA, and WALHI. Nusantara Fund also applies an approach that prioritizes an active and frequent communication approach in providing administrative, financial, and technical assistance to Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities during the program implementation process.





BAGIAN V

Epilog

Meskipun program pendanaan Nusantara Fund telah berjalan setidaknya selama setahun belakangan, tetapi tetap saja upaya-upaya untuk merawat bumi harus tetap dilakukan. Karena kami sepenuhnya sadar ketika upaya-upaya pelestarian kami galakkan, di saat bersamaan kegiatan pengrusakan alam oleh kepentingan modal berdatangan dalam gelombang yang lebih besar. Tantangan itu bisa saja terus terjadi sampai beberapa tahun mendatang selama belum ada perubahan kebijakan yang menekan laju eksploitasi kekayaan alam.

Selain itu, kami juga memiliki tugas untuk tetap melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan siklus-siklus yang sudah berjalan supaya tantangan dan peluang yang ditemukan selama pelaksanaan program bisa dibukukan dengan rapi. Kaitannya dengan program pendanaan Nusantara Fund secara umum, bahwa pembukuan tantangan dan peluang tersebut akan memberikan masukan perbaikan bagi pelaksanaan siklus-siklus selanjutnya. Dengan demikian, program pendanaan tetap berjalan dalam kerangka pikir dan target yang telah dibuat di awal, dengan tanpa

SECTION V

Epilogue

While Nusantara Fund's direct funding program has only been running for at least a year, efforts to care for the earth must continue. Because we are fully aware that while we are promoting conservation efforts, at the same time the destruction of nature by capital interests is coming in bigger waves. This challenge may continue for years to come if there are no policy changes that reduce the rate of natural resources exploitation.

In addition, we have the task of monitoring and evaluating various activities undertaken during the cycles, so that the challenges and opportunities found during the implementation of the program can be recorded neatly. The recording of challenges and opportunities will provide input for improvement for the implementation of the next cycles. Thus, the funding program continues to run within the framework and targets that have been set at the beginning, with the highest respect for the efforts made by Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities. To our mind, repeating the emphasis on giving the highest respect to the implementers is extremely important. That's what differentiates Nusantara Fund from other climate funds

mengurangi penghormatan tertinggi kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal. Pikir kami, penekanan terhadap pemberian penghormatan tertinggi kepada Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal sangat penting dilakukan berkali-kali. Karena itulah pembeda pendanaan Nusantara Fund dengan pendanaan iklim yang lain, yang lebih bersifat programatik hingga terasa mengabaikan inisiatif dan kebutuhan masyarakat tingkat tapak serta seperti hanya melimpahkan permasalahan ke pihak lain.

Berkenaan dengan capaian, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Nusantara Fund telah berhasil memenuhi Target 4 dan Target 5. Ke depan, Nusantara Fund akan lebih mendorong proposal inisiatif untuk Target 1, Target 2, dan Target 3. Meski tidak menutup kemungkinan untuk tetap menerima proposal Target 4 dan Target 5, bila itu memang menjadi kebutuhan utama calon penerima dana. Dengan cara seperti itu, sebenarnya juga tidak mengubah tujuan program, karena seperti yang diketahui tujuan pendanaan iklim Nusantara Fund yaitu untuk meningkatkan posisi tawar dan kualitas hidup masyarakat tingkat tapak.

Dorongan untuk inisiatif pemetaan wilayah, pengusulan pengakuan wilayah kelola, dan restorasi serta rehabilitasi (Target 1-Target 3) akan memberikan nilai penguatan terhadap perjuangan yang tengah dilakukan oleh Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal. Setidaknya dengan pengetahuan terkait luasan dan legitimasi atas wilayah kelola, masyarakat tingkat tapak memiliki nilai tawar saat berhadapan dengan kepentingan maupun kebijakan yang selama ini telah memarginalkan kedudukan mereka. Pun demikian dengan upaya restorasi dan rehabilitasi bisa dijadikan sebagai strategi pendudukan.

Selanjutnya, terkait dengan pembuktian keberhasilan program. Untuk menjawab tantangan tersebut, manajemen pengetahuan yang baik sangat dibutuhkan di sini. Manajemen pengetahuan dimaksudkan untuk merekam setiap upaya yang dilakukan Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal dalam program yang didanai oleh Nusantara Fund. Dari situ akan ditemukan ukuran atau indikator keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Keberhasilan yang kami maksud tidak hanya berbentuk angka, capaian dalam kegiatan pemetaan, jumlah dokumen hukum pengakuan identitas komunitas, luas lahan yang berhasil direhabilitasi, total peserta yang terlibat dalam pendidikan basis, dan jumlah ekonomi kolektif. Namun, juga perubahan, dalam bentuk pengetahuan maupun kesadaran baru, yang terjadi selama dan sesudah pelaksanaan program.

Keberhasilan dalam bentuk perubahan sosial itu bisa jadi akan dipandang sebelah mata bagi pihak lain, terutama bagi kelompok yang terlalu terobsesi pada capaian angka-angka. Namun, yang perlu ditekankan ialah perubahan-perubahan tersebut muncul dari inisiatif langsung Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal. Bagi kami, perubahan dalam bentuk pengetahuan dan kesadaran mereka lebih berharga, meski tentunya kami juga masih berpeluang untuk mempublikasikan capaian dalam bentuk angka. Pun, perlu

which are more programmatic and seem to ignore the initiatives and needs of communities at the site level and seem to just passing the problem on to other parties.

Regarding milestones, as previously explained, Nusantara Fund has successfully met Target 4 and Target 5. Going forward, Nusantara Fund will encourage more initiative proposals for Target 1, Target 2, and Target 3. Although it does not rule out the possibility of still receiving Target 4 and Target 5 proposals, if that is indeed the main need of the prospective grantees. It does not change the purpose of Nusantara Fund's climate funding i.e. to improve the bargaining position and quality of life of the grassroots communities.

Encouraging the initiatives for territory mapping, proposal for recognition of management area, and restoration and rehabilitation (Target 1-Target 3) will strengthen the ongoing struggles of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities. At least with knowledge related to the size and legitimacy of their management area, the community at the site level has bargaining power when dealing with interests and policies that have marginalized their position. Besides, restoration and rehabilitation efforts can be used as an occupation strategy.

To answer the challenge of proving the success of direct funding mechanism, an excellent knowledge management is required. Knowledge management is intended to record every single effort made by Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities in initiatives funded by the Nusantara Fund. From there, we can draw success indicators and measurements, of which credibility can be accounted for. Success is not only limited to numbers, achievements in mapping activities, the number of legal documents recognizing community's identity, the size of rehabilitated land, the total number of participants involved in critical education, and the number of collective economies, but success can also take the form of changes, new knowledge and awareness that occur during and after program implementation.

The success in the form of social change may be underestimated by others, especially those who are too obsessed with numerical achievements. It is important to note that these changes came from the direct initiative of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities. For us, changes in the form of their knowledge and awareness are more valuable, although we can publish achievements in numbers too. It is important to keep in mind that the success in the

diingatkan bahwa keberhasilan dalam bentuk angka tersebut belum bisa disaksikan dalam waktu dekat ini, mengingat durasi pelaksanaan program di Nusantara Fund hanya berkisar 3 bulan per siklus. Butuh waktu yang lumayan lama untuk menyaksikan keberhasilan tersebut. Lagipula, Nusantara Fund juga tidak berambisi menjadi Bandung Bondowoso yang membangun seribu candi dalam waktu satu malam.

Terakhir, dukungan terhadap upaya-upaya yang menguatkan perjuangan Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal ini tentu membutuhkan saluran dana yang sangat besar. Nusantara Fund akan memanfaatkan jaringan pendanaan iklim global yang sudah terbangun sampai saat ini. Di luar itu, tentunya kami juga berharap bahwa dukungan-dukungan pendanaan dari pihak-pihak lain terus berdatangan, sehingga mekanisme pendanaan langsung yang kami laksanakan saat ini tetap berjalan.

form of numbers cannot be witnessed in the near future, considering the program implementation at Nusantara Fund takes only 3 months per cycle. It takes quite a long time to witness this success. After all, Nusantara Fund also has no ambition to become *Bandung Bondowoso* who built a thousand temples overnight.

Finally, supporting the efforts that strengthen the struggles of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities requires channeling a huge amount of funding. The Nusantara Fund will leverage the global climate finance network that has been built to date. We also hope that funding support will also come from other sources, so that the direct funding mechanism we are currently implementing will continue to work.



“

...yang perlu ditekankan ialah perubahan-perubahan tersebut muncul dari inisiatif langsung Masyarakat Adat, Organisasi Rakyat, dan Komunitas Lokal. Bagi kami, perubahan dalam bentuk pengetahuan dan kesadaran mereka lebih berharga, meski tentunya kami juga masih berpeluang untuk mempublikasikan capaian dalam bentuk angka. Pun, perlu diingatkan bahwa keberhasilan dalam bentuk angka tersebut belum bisa disaksikan dalam waktu dekat ini, mengingat durasi pelaksanaan program di Nusantara Fund hanya berkisar 3 - 6 bulan per siklus. Butuh waktu yang lumayan lama untuk menyaksikan keberhasilan tersebut. Lagipula, Nusantara Fund juga tidak berambisi menjadi Bandung Bondowoso yang membangun seribu candi dalam waktu satu malam.

- Ode Rakhman, Direktur Nusantara Fund -

”

It is important to note that these changes came from the direct initiative of Indigenous Peoples, People's Organizations, and Local Communities. For us, changes in the form of their knowledge and awareness are more valuable, although we can publish achievements in numbers too. It is important to keep in mind that the success in the form of numbers cannot be witnessed in the near future, considering the program implementation at Nusantara Fund takes only 3 months per cycle. It takes quite a long time to witness this success. After all, Nusantara Fund also has no ambition to become Bandung Bondowoso who built a thousand temples overnight

- Ode Rakhman, Direktur Nusantara Fund -



NUSANTARA FUND

By:



Local Practices for Global Commons